

**PEMBIAYAAN PEDIDIKAN BERDASARKAN
STRATEGI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
(MBS) DI SMK PGRI 3 MALANG**

SKRIPSI



**Oleh:
RETNO AKHYAR FAUZI
NIM: 01160043**

**JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PRODI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
2008**

**PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERDASARKAN
STRATEGI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
(MBS) DI SMK PGRI 3 MALANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Pada Program Strata- I Sarjana Pendidikan IPS (S. Pd)*



Oleh:

RETNO AKHYAR FAUZI

01160043

**JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PRODI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
2008**

**PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERDASARKAN
STRATEGI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
(MBS) DI SMK PGRI 3 MALANG**

Oleh:

RETNO AKHYAR FAUZI

01160043

Telah disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Dr. H. Agus Maimun, M. Pd

NIP: 150 289 468

Mengetahui
Ketua Jurusan Pendidikan IPS

Drs. M. Yunus, M. Si

NIP: 150 276 940

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERDASARKAN
STRATEGI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
(MBS) DI SMK PGRI 3 MALANG**

SKRIPSI

Oleh :

RETNO AKHYAR FAUZI**NIM: 01160043**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Sudi Pendidikan Ekonomi (S. Pd)
Pada tanggal 15 Juli 2008

SUSUNAN DEWAN PENGUJI**TANDA TANGAN**

1. Dr. Zainuddin M.A
NIP: 150 275 502

Penguji Utama

2. Dr. H. Agus Maimun, M. Pd
NIP: 150 289 469

Pembimbing

3. Abdul Basith, S. Pd, M. Si
NIP:

Sekretaris

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

Prof. Dr. H. Muhammad Djunaidi Ghony
NIP. 150 042 031

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur yang teramat dalam,

kupersembahkan karya ini kepada:

1. Ayahanda M. Chozin dan Ibunda Anik Setianingsih. Dari kalianlah kuperoleh arti sebuah perjuangan dan arti hidup yang sebenarnya.
2. Adik-adikku tercinta (Ulfah Kurniawati dan Salistia Muniroh) yang selalu membuatku bersemangat dan membuatku mengerti akan pentingnya kasih sayang dan rasa tanggung jawab.
3. Keluarga Gatot Budianto yang selalu memberi motivasi dan tidak henti-hentinya mengingatkanku untuk selalu menyelesaikan skripsi dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Guru yang selama ini tak pernah merasa lelah dalam mendidik dan mengajarkan pengetahuannya kepada saya.
5. Sahabat-sahabat Kostku, yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan; Bejo Indra Qadarsih, Didik Kuntariadi, Hanif Nashrul Aziz, Rizki Cobain Kamil, Syahbudin Bourdy Ubay dan Istri, Ahmad Wasito, Aa' Nyonk Afif, Paidin Ramadhani, Sugik Watimena. Terima kasih Sahabat!

MOTTO

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ۝

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

(Qur'an Surat Al Israa': 26)



Dr. H. Agus Maimun, M. Pd
Dosen Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri Malang
NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Retno Akhyar Fauzi
Lam : 4 (Empat) Eksemplar

Malang, 22 Juni 2008

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang
Di
Malang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

sesudah melakukan beberapakali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : RetnoAkhyar Fauzi
Nim : 01160043
Jurusan : Pendidikan IPS (Konsentrasi Ekonomi)
Judul Skripsi : Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Strategi
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK PGRI
03 Malang

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk di ujikan.

Demikian, mohon di maklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing

Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 150 214 978

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 22 September 2006

Retno Akhyar Fauzi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan sekalian alam, lantunan shalawat beriring salam syahdu berkumandang atas Rasulullah SAW. Tak lupa ucapan alhamdulillah, atas terselesaikannya skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Stara Satu (S-1) Pendidikan IPS Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Penulis menyadari bahwa tujuan penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan moril dan materiil dari banyak pihak, untuk itu penulis patut mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Djunaidi Ghony selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
3. Bapak Drs. Muh. Yunus, M. Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
4. Bapak Dr. H. Agus Maimun M. Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ayahanda M. Chozin dan Ibunda Anik Setianingsih beserta adik-adikku Ulfah Kurniawati dan Salistia Muniroh yang selalu membimbing, mengarahkan dan mengirim do'a dalam setiap langkahku dengan ketulusan hati dan kesabaran.

6. Keluarga Gatot Budianto yang selalu memberi motivasi dan tidak henti-hentinya mengingatkan untuk selalu menyelesaikan skripsi dan melakukan yang terbaik.
7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Malang yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
8. Bapak Drs. Beskinur selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang yang telah mengizinkan dan memberikan waktu untuk penelitian di SMK 3 Malang.
9. Ibu Katri, Ibu Meta, Ibu Heni, dan Ibu Purwanti selaku karyawan administrasi umum SMK PGRI 3 Malang yang telah membimbing, memberikan informasi dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan; Bejo Indra Qadarsih, Didik Kuntariadi, Hanif Nashrul Aziz, Rizki Kamil, Syahbudin Bourdy Ubay dan Istri, Ahmad Wasito, Aa' Nyonk Afif, Paidin Ramadhani, dan Sugik Watimena.
11. Semua pihak yang telah mendukung atas terselesaikannya skripsi ini

Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain do'a dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga Allah SWT menerima amal baik dan memberi balasan yang setimpal atas segala jerih payahnya dan semoga kita semua dalam perlindungan-Nya, Amin. Sepenuhnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan.oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis panjatkan rasa syukur yang mendalam dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya. Amin Ya Rabbil Alamin

Malang, 4 Juli 2008

Penulis



DAFTAR TABEL

Tabel. 1 : Deskripsi program BOMM

Tabel. 2 : Data Siswa SMK PGRI 3 Malang periode 2007-2008

Tabel. 3 : Daftar Guru SMK PGRI 3

Tabel. 4 : Daftar Karyawan SMK PGRI 3 Malang

Tabel. 5 : Biaya Pendaftaran Masuk SMK PGRI 3 Malang

Tabel. 6 : RAPBS SMK PGRI 3 Malang periode 2006-2007

Tabel. 7 : Kutipan buku Kas Tabelaris (Penerimaan)

Tabel. 8 : Kutipan buku Kas Tabelaris (Pengeluaran)

Tabel. 9 : RAPBS SMK PGRI 3 Malang periode 2007-2008

DAFTAR BAGAN

Gambar 1: Struktur Organisasi SMK PGRI 3 Malang Periode 2007-2008



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
NOTA DINAS	vii
SURAT PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xviii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penegasan Istilah	9
G. Sistematika Pembahasan	10

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Pembiayaan Pendidikan12

1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan13
2. Jenis-jenis Pembiayaan Pendidikan14
3. Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan16
4. Pembiayaan Pendidikan dari Pemerintah17
5. Pembiayaan Pendidikan dari Orang tua/wali siswa23
6. Pembiayaan Pendidikan dari Masyarakat26
7. Menghitung Pembiayaan Pendidikan30

B. Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Strategi

Manajemen Berbasis Sekolah32

1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah34
2. Perencanaan Pengelolaan Dana38
3. Pengelolaan Dana41
4. Proses Penyusunan Anggaran43
5. Penyusunan RAPBS50
6. Pengawasan Anggaran53

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian58

B. Kehadiran Peneliti59

C. Lokasi Penelitian60

D. Sumber Data	61
E. Prosedur Pengumpulan Data	62
F. Teknik Analisa Data	64
G. Pengecekan Keabsahan Data	66
H. Tahap-tahap Penelitian	68

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Obyek

1. Sejarah Singkat SMK PGRI 3 Malang	70
2. Lokasi SMK PGRI 3 Malang	73
3. Visi dan Misi SMK PGRI 3 Malang	75
4. Bidang dan Program-program Keahlian SMK PGRI 3 Malang	76
5. Sarana dan Prasarana SMK PGRI 3 Malang	78
6. Sumber Daya Manusia SMK PGRI 3 Malang	79
7. Struktur Organisasi SMK PGRI 3 Malang	80
8. Daftar Guru SMK PGRI 3 Malang	82

B. Penyajian Data

1. Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Strategi Manajemen

Berbasis Sekolah di SMK PGRI 3 Malang	87
a. Sumber Pembiayaan Pendidikan di SMK PGRI 3 Malang	88
b. Pengelolaan Dana di SMK PGRI 3 Malang	98
c. Proses Penyusunan Anggaran di SMK PGRI 3 Malang	100
d. RAPBS SMK PGRI 3 Malang	102

e. Pengawasan Anggaran di SMK PGRI 3 Malang	107
---	-----

2. Peluang dan Tantangan Pembiayaan Pendidikan

di SMK PGRI 3 Malang	109
-----------------------------------	------------

a. Peluang Pembiayaan Pendidikan	
di SMK PGRI 3 Malang.....	109
b. Tantangan Pembiayaan Pendidikan	
di SMK PGRI 3 Malang.....	111

BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Strategi Manajemen	
 Berbasis Sekolah di SMK PGRI 3 Malang	112
B. Peluang dan Tantangan Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan	
 Strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	
 di SMK PGRI 3 Malang	118

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	121
B. Saran-saran	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Retno Akhyar Fauzi
NIM : 01160043
Judul : Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK PGRI 3 Malang
Pembimbing : Dr. H. Agus Maimun, M. Pd
Kata Kunci : Pembiayaan Pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Implikasi diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan, membuat para pengambil keputusan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang komponen pembiayaan pendidikan. Kebutuhan tersebut dirasakan semakin mendesak sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah yang juga meliputi bidang pendidikan. Apalagi masalah pembiayaan ini sangat menentukan kesuksesan program MBS, KBK, ataupun KTSP yang saat ini diberlakukan.

Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma Post-positivisme dengan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan (1) Pembiayaan pendidikan berdasarkan Strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), (2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat pembiayaan pendidikan.

Penelitian ini dilaksanakan pada satuan pendidikan yakni di SMK PGRI 3 Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh ada dua macam yakni, data primer dari hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi; sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data sekolah dan berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan.

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis data penelitian diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : (1) SMK PGRI 3 Malang merupakan sekolah yang swadana. Sumber utama pembiayaan pendidikan di SMK PGRI 3 Malang berasal dari siswa dan dunia industri, (2) Biaya pendidikan di SMK PGRI 3 Malang dibagi dalam tiga kategori yakni biaya operasional, biaya pengembangan SDM, dan biaya investasi, (3) Kegiatan pembiayaan pendidikan di SMK PGRI 3

Malang meliputi, perencanaan dana, pengelolaan dana, penyusunan RAPBS dan pengawasan anggaran, (4) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kegiatan pembiayaan pendidikan di SMK PGRI 3 Malang dibedakan atas faktor internal dan eksternal sekolah.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Implikasi diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan, membuat para pengambil keputusan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang komponen pembiayaan pendidikan. Kebutuhan tersebut dirasakan semakin mendesak sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah yang juga meliputi bidang pendidikan. Apalagi masalah pembiayaan ini sangat menentukan kesuksesan program MBS, KBK, ataupun KTSP yang saat ini diberlakukan.

Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini.

Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintahan daerah, memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu : 1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki; 2) Efisiensi Keuangan, hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; 3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat; 4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan¹.

Desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah. Sejalan dengan sistem desentralisasi yang mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah termasuk otonomi di bidang pendidikan, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar yakni sistem pendidikan

¹ Marihot Manulang, "Otonomi Pendidikan", http://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi_pendidikan.html, Akses 27 April 2008

nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian. Sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Otonomi pendidikan di era otonomi daerah, di samping untuk memberikan otonomi kepada daerah dalam pengelolaan pendidikan, juga memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengelolaan pendidikan.

Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan/kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan merdeka/tidak tergantung. Kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan tolok ukur utama kemandirian sekolah. Pada gilirannya, kemandirian yang berlangsung secara terus menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah. Istilah otonomi juga sama dengan istilah “swa”, misalnya swasembada, swadana, swakarya, dan swalayan².

Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Tentu saja kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi/ menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumberdaya, kemampuan memilih cara pelaksanaan

² <http://www.balipost.com/balipostcetak/2007/7/25/o2.htm>, Akses 25 April 2008

yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri³.

Dengan otonomi yang lebih besar, maka sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang tentu saja, lebih berdaya dalam mengembangkan dalam mengembangkan program-program yang, tentu saja, lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dengan fleksibilitas/keluwesannya, sekolah akan lebih lincah dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya sekolah secara optimal. Demikian juga dengan partisipasi atau keikutsertaan warga sekolah dan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan sekolah, maka rasa memiliki mereka terhadap sekolah dapat ditingkatkan. Peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan peningkatan rasa tanggung jawab, dan peningkatan rasa tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi warga sekolah dan masyarakat terhadap sekolah. Inilah esensi partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam pendidikan. Baik peningkatan otonomi sekolah, fleksibilitas pengelolaan sumberdaya sekolah maupun partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah tersebut kesemuanya ditujukan

³ Depdiknas, "*Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)*", [http:// www.depdiknas.com/ mpmbs](http://www.depdiknas.com/mpmbs), Akses 26 April 2008

untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan-kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴.

Otonomi pendidikan di era otonomi daerah, di samping untuk memberikan otonomi kepada daerah dalam pengelolaan pendidikan, juga memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengelolaan pendidikan yang kemudian diperkuat dengan turunnya PP 19 tahun 2005 yang menyatakan bahwa sekolah pada semua jenjang dan tingkatan di Indonesia menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan suatu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesannya kepada sekolah dan mendorong partisipasi langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai dengan keinginan dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau stakeholder. Dengan otonomi yang lebih besar sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya.

Desentralisasi pendidikan merupakan bagian dari kerangka otonomi daerah yang berimplikasi pada perimbangan keuangan pusat-daerah, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Sesuai dengan arah otonomi, sumber pembiayaan rutin dan pembangunan pendidikan harus bersumber dari

⁴ http://www.uny.com/kuliah_online: "Inisiasi 1: Manajemen Berbasis Sekolah", Hlm.1, Akses 17 Maret 2008

⁵ Mulyasa, "Manajemen Berbasis Sekolah", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 24

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota⁶. Dalam kerangka otonomi daerah dan MBS, yang menjadi pusat perhatian adalah kewenangan daerah dan sekolah dalam mengelola pembiayaan proses pendidikan. Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan biaya.

Salah satu sekolah yang telah melaksanakan pembiayaan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah adalah SMK PGRI 3 Malang, hal tersebut diperkuat dengan prestasi yang diperoleh SMK PGRI 3 Malang yakni penghargaan Sertifikat ISO 9001:2000. Penyerahan penghargaan ini dilakukan oleh perwakilan dari USB selaku pelaksana ISO Award kepada Walikota Malang, Drs. Peni Suparto, M.AP dan diteruskan kepada Kepala SMK PGRI 3 Malang. ISO 9001:2000 merupakan salah satu syarat untuk peningkatan status sekolah menjadi standar Internasional. Pemberian penghargaan tersebut didasarkan atas pelaksanaan manajemen sekolah yang baik dan serius sehingga tercapai kesejahteraan dan peningkatan mutu SDM yang ada di sekolah tersebut serta menghasilkan output siswa yang siap direkrut oleh dunia kerja.

⁶ Nasrullah Nara, "Jalan Terjal Menuju Otonomi Pendidikan", Kompas, Selasa, 17 Desember 2008, hlm. 11

Dari rangkaian latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti berinisiatif untuk mengambil judul **“PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERDASARKAN STRATEGI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMK PGRI 3 MALANG”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembiayaan pendidikan berdasarkan strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK PGRI 03 Malang?
2. Bagaimanakah peluang dan tantangan pembiayaan pendidikan berdasarkan strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK PGRI 03 Malang?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya area pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar beserta peluang dan tantangannya di SMK PGRI 03 Malang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dua rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pembiayaan pendidikan berdasarkan strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK PGRI 3 Malang?

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peluang dan tantangan dalam pembiayaan pendidikan berdasarkan strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK PGRI 3 Malang?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberi gambaran pada cara pembiayaan pendidikan berdasarkan strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
2. Memberi kontribusi pada cara pemahaman konsep pembiayaan berdasarkan strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Secara praktis manfaat dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

1. Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di Jurusan IPS (Konsentrasi Ekonomi), Fakultas Tarbiyah UIN Malang.
2. Sebagai wahana dalam meningkatkan kompetensi dalam hal penelitian dan penulisan serta ilmu pengetahuan
3. Sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik

b. Bagi Lembaga

1. Sebagai bahan rujukan dan evaluasi dalam mengambil keputusan dalam kegiatan belajar mengajar.

2. Sebagai refrensi dalam melakukan pembenahan-pembenahan dan pengembangan-pengembangan dalam pendekatan pembelajaran.

c. Bagi Masyarakat

1. Sebagai in-put dalam pelaksanaan pembenahan-pembenahan dan pengembangan-pengembangan dalam proses belajar di luar sekolah
2. Menumbuhkan kesadaran dan semangat masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan.

F. Penegasan Istilah

Pembiayaan Pendidikan : Proses pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan satuan uang yang telah terjadi atau yang kemudian akan terjadi dalam proses pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas.

G. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika penulisan laporan dan pembahasannya disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, dan Definisi Operasional.

BAB II Kajian Pustaka, meliputi: A. Pembiayaan Pendidikan: Pengertian Pembiayaan Pendidikan, Jenis-jenis Pembiayaan Pendidikan, Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan. Menghitung Biaya Pendidikan. B. Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Perencanaan Pengelolaan Dana, Pengelolaan Dana, Proses Penyusunan Anggaran, Penyusunan Rencana dan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah, Pengawasan Anggaran.

BAB III Metode Penelitian: Pendekatan dan Jenis penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, meliputi: A. Latar Belakang Objek: Sejarah singkat SMK PGRI 3 Malang, visi dan misi SMK PGRI 3 Malang, bidang dan program-program keahlian di SMK PGRI 3 Malang,

struktur organisasi SMK Negeri 3 Malang, daftar guru dan tenaga administrasi SMK PGRI 3 Malang, sarana dan prasarana SMK PGRI 3 Malang.

B. Penyajian Data: 1. Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK PGRI 3 Malang. 2. Peluang dan Tantangan Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK PGRI 3 Malang.

BAB V Pembahasan Hasil Penelitian: A. Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK PGRI 3 Malang. B. Peluang dan Tantangan Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK PGRI 3 Malang.

BAB VI Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Biaya (*cost*) merupakan salah satu komponen masukan (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah⁷. Dalam hal ini, biaya dapat diartikan sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan⁸. Secara bahasa biaya (*cost*) dapat diartikan pengeluaran, dalam istilah ekonomi, biaya/pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya⁹. Biaya pendidikan dapat juga diartikan sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargaikan dengan uang)¹⁰.

Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan penerapan pengelolaan pendidikan, lebih terasa lagi dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

⁷ Dedi Supriadi, "Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah", Cet. 6, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 3

⁸ Harsono, "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan", Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hlm. 9.

⁹ J. Hallak, "Analisis Biaya dan Pengeluaran Untuk Pendidikan", International Institute For Educational Planning, UNESCO, http://www.unesco.co.id/artikel_pendidikan. Akses 5 Mei 2008.

¹⁰ *Opcit* hlm 3

yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah¹¹. Menurut Dedi Supriadi, biaya pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orangtua, maupun siswa itu sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung (*indirect cost*) adalah berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Dalam pembiayaan pendidikan, pengeluaran yang tidak memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dapatlah disebut sebagai pemborosan atau pengeluaran yang mestinya dapat dicegah. Lembaga pendidikan dikatakan boros apabila mengeluarkan dana operasional, dana pengembangan, dana kesiswaan, dan dana lain melebihi dana yang seharusnya diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan pada unit kerjanya¹².

Sedangkan mengutip Rencana Strategis Pendidikan 2005-2009 yang dikemukakan Menteri Pendidikan Nasional, Pembiayaan pembangunan pendidikan merupakan segala pengeluaran ataupun

¹¹ Mulyasa, "Manajemen Berbasis Sekolah", Cet. 11, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, Hlm.

48

¹² *Opcit*, hlm. 10

pengorbanan dalam rangka pemerataan dan perluasan akses; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, yang bersumber pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dana masyarakat.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan.

Dalam teori dan praktek pembiayaan pendidikan, baik pada tataran makro (*nasional*) dan mikro (*sekolah*), dikenal jenis-jenis biaya pendidikan yakni biaya langsung (*direct cost*) dan tak langsung (*indirect cost*), biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*), biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan biaya bukan dalam bentuk uang (*non-monetary cost*)¹³. Sedangkan menurut sumbernya, biaya pendidikan tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali siswa, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/ wali siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri¹⁴.

a. Biaya langsung dan tak langsung.

1) Biaya langsung.

¹³ Dedi Supriadi, "Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah", Cet. 6, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 4.

¹⁴ Harsono, "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan", Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hlm. 10

Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Contoh: Gaji guru, pembelian sarana dan prasarana, dan lain sebagainya¹⁵.

2) Biaya tak langsung.

Biaya tak langsung adalah segala pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Contoh: Iuran rutin sekolah (bulanan), biaya ulangan / tes prestasi belajar, biaya kegiatan ekstra-kurikuler, praktikum, pembelian buku pelajaran / latihan / LKS, pembelian buku tulis dan alat-alat tulis, biaya transportasi sekolah dan lain sebagainya¹⁶.

b. Biaya pribadi.

Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga dengan pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*¹⁷). Contoh: Pembelian tas sekolah, pembelian sepatu sekolah, pembelian pakaian seragam sekolah pembelian pakaian olahraga, uang saku / jajan siswa disekolah dan biaya lainnya. Biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk pendidikan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain tidak sama, karena dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain¹⁸:

1) Perbedaan antar-provinsi/kabupaten

¹⁵ Opcit, hlm. 4.

¹⁶ Opcit, hlm. 4

¹⁷ Opcit, hlm, 4

¹⁸ Moch. Idochi Anwar, "Administrasi Pendidikan dan Managemen Biaya Pendidikan", Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 18

- 2) Pengeluaran keluarga berdasarkan status social
- 3) Pengeluaran keluarga berdasarkan lokasi sekolah
- 4) Pengeluaran keluarga berdasarkan tingkat penghasilan
- 5) Pengeluaran keluarga berdasarkan penampilan fisik sekolah
- 6) Pengeluaran siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang tua.

c. Biaya sosial.

Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat bukan orang tua/wali siswa, biaya dari yayasan/ perusahaan. Contoh: BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Biaya hibah, dan lain sebagainya¹⁹.

3. Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan

Menurut Harsono, biaya pendidikan tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali siswa, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/ wali siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri²⁰. Sedangkan menurut Dedi Supriadi, sumber-sumber biaya terbagi atas biaya pendidikan pada tingkat makro (nasional) dan biaya pendidikan pada tingkat mikro (sekolah)²¹. Biaya pada tingkat makro berasal dari:

- a. Pendapatan negara dari sektor pajak

¹⁹ *Opcit*, hlm. 9.

²⁰ Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hlm. 9.

²¹ Dedi Supriadi, *"Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah"*, Cet. 6, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 5-6.

- b. Pendapatan dari sektor non-pajak misalnya dari pemanfaatan sumber daya alam dan produksi nasional lainnya yang lazim dikategorikan ke dalam gas dan non-migas
- c. Keuntungan dari sektor barang dan jasa
- d. Usaha-usaha negara lainnya, termasuk dari divestasi saham pada perusahaan negara (BUMN)
- e. Bantuan dalam bentuk hibah dan pinjaman luar negeri.

Sedangkan biaya pada tingkat mikro (sekolah), berasal dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat.

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pembiayaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundangan yang berlaku, kebijakan Mendiknas, program-program pembangunan pendidikan dan sasarannya, serta penerapan program dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam lima tahun ke depan, pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan masih akan menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, baik sarana-prasarana, ketenagaan, maupun anggaran pendidikan baik dari sumber APBN maupun APBD. Oleh karena itu, strategi pembiayaan disusun untuk menyiasati keterbatasan sumber daya tersebut agar pelaksanaan program pembangunan pendidikan dapat memberikan andil yang signifikan terhadap pencapaian tujuan

pendidikan nasional seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.²²

Mengenai pembiayaan pendidikan, pemerintah menegaskan melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XIII, Bagian Keempat, Pasal 49 ayat 3, berbunyi:

"Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku."

Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas lagi dalam Perpres No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009, Bagian IV Bab 27 butir D Program-Program Pembangunan No. 2.1, berbunyi:

"Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah pedesaan, wilayah terpencil dan kepulauan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai dan atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan."

Kebijakan desentralisasi pendidikan juga menuntut peningkatan kemampuan daerah dalam perencanaan dan

²² <http://www.depdiknas/renstra>, "Strategi Pembiayaan Pendidikan", 2007, Hal: 66

pengelolaan pembangunan pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat menyusun strategi pembiayaan untuk dapat mencapai target-target program yang disusun dalam perencanaan pembangunan pendidikan untuk lima tahun ke depan. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam berbagai aspek manajemen penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari strategi penerapan Rencana strategis Depdiknas.²³ Pembiayaan pendidikan pusat berupa:

1) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU (Dana Alokasi Umum) adalah dana yang dikeluarkan pemerintah yang dialokasikan berdasarkan tujuan pemerataan dengan mempertimbangkan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. DAU juga berfungsi untuk menjamin ketersediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan memperkecil kesenjangan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang.

2) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai

²³ Ibid, Hal: 66

dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Dalam konteks pendidikan, DAK digunakan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, khususnya program kegiatannya diarahkan untuk membiayai rehabilitasi gedung/ruang kelas SD/SDLB, MI/Salafiyah termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan pelaksana program wajib belajar, baik negeri maupun swasta²⁴.

DAK diberikan untuk membantu kebutuhan-kebutuhan khusus daerah, yaitu mencakup kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan DAU atau kebutuhan yang menjadi komitmen dan prioritas nasional. Termasuk dalam prioritas nasional adalah proyek yang dibiayai negara donor, pembiayaan reboisasi oleh daerah dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan PP No. 104 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan, kriteria teknis untuk dapat dibiayai melalui DAK ditetapkan menteri teknis/instansi terkait, untuk sektor pendidikan adalah Depdiknas. DAK tidak bias digunakan untuk biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah, dan

²⁴ *Ibid*, hlm. 69

biaya umum sejenis lainnya. DAK dapat digunakan untuk membiayai investasi pengadaan, peningkatan, sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang²⁵

3) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil terdiri dari bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan sumber daya alam. Besarnya bagian daerah ditentukan berdasarkan potensi daerah penghasil²⁶.

4) BOS dan BOMM

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam membiayai pendidikan setelah kenaikan harga BBM. Secara umum, Program BOS cenderung dilaksanakan sebagai subsidi umum. Hal ini terjadi karena Program BOS memiliki cakupan yang luas dan merata, baik dilihat dari jumlah sekolah maupun jumlah siswa. Sekolah yang menolak Program BOS hanya sebagian kecil saja dan umumnya sekolah yang relatif kaya. Keputusan untuk menolak Program BOS dilakukan secara sepihak oleh pengelola sekolah, tanpa bermusyawarah dengan orangtua murid. Siswa yang menjadi

²⁵ Nina Toyamah dan Syaikhul Usman, "Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya Terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar", Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta, 2004 hlm. 9

²⁶ *Ibid*, hlm. 9

sasaran BOS adalah seluruh siswa, baik dari keluarga miskin maupun tidak miskin²⁷. Berikut adalah contoh bantuan dari Pemerintah pusat dan daerah terkait pembiayaan pendidikan.

**DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU
TAHUN 2008**

1	KODE PROGRAM	:	2 - 35 – DK
2	NAMA PROGRAM	:	BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SMK
3	TUJUAN	:	1. Meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK 2. Mendukung ketersediaan bahan ajar pendukung praktik dan bahan praktik dalam proses belajar mengajar
4	SASARAN	:	Sasaran Nasional Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) terdiri dari 2.792.768 peserta didik. Sedang sasaran per provinsi disesuaikan dengan alokasi Kegiatan Perencanaan Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK tahun 2008 pada Dinas Pendidikan Provinsi.
5	NILAI BANTUAN	:	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per peserta didik.
6	PEMANFAATAN DANA		Dana BOMM digunakan terutama untuk : 1. Pengadaan bahan praktik 2. Pengadaan bahan ajar pendukung praktik (working sheet/job sheet, lembar penilaian, dll)
7	PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN		1. Proposal/Usulan BOMM SMK diterima oleh Dinas Pendidikan Provinsi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

²⁷ Sami Bazzi dkk, “Kajian Cepat PKPS-BBM Bidang Pendidikan: Bantuan Operasional Sekolah (BOS)”, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta, 2006, hlm. 5

		:	2. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi																	
8	PERSYARATAN PENERIMA	:	1. SMK Negeri maupun SMK Swasta, 2. Menyampaikan data siswa SMK tingkat I, II, dan III. 3. Menyerahkan data pokok SMK 4. Menyampaikan Rencana Kegiatan/Program dan RAB pemanfaatan dana BOMM. 5. Diusulkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ke Dinas Pendidikan Provinsi.																	
9	JADUAL KEGIATAN	:	<table><tr><td>No.</td><td>Kegiatan</td><td>Waktu Pelaksanaan (2008)</td></tr><tr><td>1</td><td>Penyerahan Rencana Program</td><td>Maret – April</td></tr><tr><td>2</td><td>Penetapan Penerima BOMM</td><td>Mei</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyaluran dana ke SMK</td><td>Mei - Juni</td></tr><tr><td>5</td><td>Pelaporan</td><td>Mgg I Desember</td></tr></table>			No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (2008)	1	Penyerahan Rencana Program	Maret – April	2	Penetapan Penerima BOMM	Mei	3	Penyaluran dana ke SMK	Mei - Juni	5	Pelaporan	Mgg I Desember
No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (2008)																		
1	Penyerahan Rencana Program	Maret – April																		
2	Penetapan Penerima BOMM	Mei																		
3	Penyaluran dana ke SMK	Mei - Juni																		
5	Pelaporan	Mgg I Desember																		
10	LAYANAN INFORMASI	:	1). Dinas Pendidikan Provinsi 2). Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK Jakarta Telp. 021 – 5725474 Website : http://www.ditpsmk.net																	

b. Orang Tua/ Wali Siswa

Selain pembiayaan yang didapat dari pemerintah pusat atau daerah, sekolah juga memperoleh pembiayaan dari orang tua atau wali siswa.. Pengeluaran keluarga untuk pendidikan dasar dan menengah itu banyak jenisnya. Berikut ini ditunjukkan komponen-komponen biaya yang ditanggung oleh orang tua siswa, meskipun tidak semua komponen berlaku untuk semua

sekolah, namun data ini memberikan gambaran tentang banyaknya pengeluaran orang tua siswa, bahkan untuk hal-hal yang menurut aturan “tidak lagi dibenarkan” dipungut di sekolah, jenis pengeluaran orang tua siswa untuk pendidikan, antara lain²⁸:

- 1) Uang pangkal / uang masuk
- 2) Iuran rutin sekolah (bulanan)
- 3) Biaya ulangan / tes prestasi belajar
- 4) Biaya kegiatan ekstra-kurikuler
- 5) Praktikum
- 6) Pembelian buku pelajaran / latihan / LKS
- 7) Pembelian buku tulis dan alat-alat tulis
- 8) Pembelian tas sekolah Pembelian sepatu sekolah
- 9) Biaya transportasi sekolah
- 10) Pembelian pakaian seragam sekolah
- 11) Pembelian pakaian olahraga
- 12) Les di sekolah oleh guru
- 13) Kursus / les diluar sekolah
- 14) Biaya karyawisata (study tour)
- 15) Sumbangan insidental kepada sekolah
- 16) Uang saku / jajan siswa disekolah
- 17) Biaya lainnya.

²⁸ <http://www.wordpress.com/artikel>, “Pembiayaan Pendidikan”, Akses Tanggal 23 April 2008

Peran serta orang tua / wali siswa dalam pendidikan berfungsi ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional. Bentuk peran serta (partisipasi) masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dapat dikategorikan pada penyelenggaraan, ketenagaan, pengadaan, bangunan, pengadaan bantuan dana, praktek, dan bantuan teknis. Pengeluaran masyarakat untuk biaya pendidikan yang paling besar adalah pengeluaran keluarga atau orang tua siswa. Namun biaya yang dikeluarkan oleh orang tua siswa ini berbeda-beda atau tidak sama, karena hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain²⁹:

- 1) Perbedaan antar-provinsi
- 2) Pengeluaran keluarga berdasarkan status sosial
- 3) Pengeluaran keluarga berdasarkan lokasi sekolah
- 4) Pengeluaran keluarga berdasarkan tingkat penghasilan
- 5) Pengeluaran keluarga berdasarkan penampilan fisik sekolah
- 6) Pengeluaran siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang

tua.

²⁹ H.Sofa, "Konsep dan Analisis Biaya Pendidikan",
http://www.wordpress.com/artikel_pendidikan, akses 25 April 2008

c. Masyarakat

Suatu usaha pendidikan harus berhubungan dengan masyarakat, demikian pula dengan pendidikan kejuruan memiliki tanggung jawab di dalam mempertahankan hubungan yang kuat dengan berbagai bidang keahlian yang berkembang di masyarakat.

Pengertian masyarakat yang dimaksud adalah dunia usaha dan dunia industri. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus relevan dengan tuntutan kerja pada dunia usaha atau industri, maka masalah hubungan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha atau industri merupakan suatu ciri karakteristik yang penting bagi pendidikan kejuruan.

Perwujudan hubungan timbal balik berupa kesediaan dunia usaha atau industri, menampung peserta didik untuk mendapat kesempatan pengalaman belajar di lapangan kerja atau industri, merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

Dalam Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004 – 2009. Bagian IV Bab 27.C Arah Kebijakan No. 19 berbunyi:

“Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.”

Peraturan tersebut diatas bermakna bahwa pembiayaan yang di dapat sekolah berasal dari partisipasi masyarakat baik yang mengikat maupun tidak. Khusus untuk SMK, pembiayaan yang didapat dari masyarakat biasanya dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan atau dunia industri, yang nantinya akan mendukung kegiatan penyampaian teori dan praktek pendidikan yang dilaksanakan di ruang kelas atau laboratorium sekolah dan menyangkut perekrutan kerja di perusahaan yang bersangkutan tentunya bagi siswa yang berprestasi. Selain biaya tersebut, terkadang sekolah mendapatkan bantuan uang atau material yang disumbangkan oleh masyarakat ataupun yayasan pendidikan yang ada di lingkungan sekitar sekolah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dapat dikategorikan³⁰:

1) Penyelenggaraan

Pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur sekolah (jalur pendidikan formal) dan jalur keluarga (informal), pada semua jenis sekolah kecuali sekolah kedinasan.

³⁰ Fatah Syukur, "Madrasah Dan Pemberdayaan Peran Masyarakat", http://www.wordpress.com/artikel_pendidikan, akses 25 April 2008, hlm 3

- 2) Ketenagaan: bantuan kependidikan dan tenaga pendidik dan bimbingan, bantuan tenaga ahli dalam pengelolaan.
- 3) Pengadaan: pembangunan gedung, ruang kelas, bahan-bahan bacaan, dan bahan praktek.
- 4) Pengadaan bantuan dana dalam bentuk sumbangan, pinjaman, beasiswa.
- 5) Praktek : pemberian kesempatan pada para peserta didik untuk praktek kerja, magang dan atau latihan kerja.
- 6) Bantuan teknis : pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Agar masyarakat mau ambil bagian untuk mendukung pembangunan pendidikan, maka ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain³¹:

1). Transparansi

Pengelolaan biaya pendidikan yang dialokasikan dalam APBN setiap tahunnya, dilakukan oleh aparat pemerintah, dan cara pengelolaan ini harus dikomunikasikan pada masyarakat.

2). Partisipasi

Keinginan untuk melibatkan diri dalam suatu kegiatan, banyak disebabkan karena adanya kesamaan tujuan,

³¹ Sofa, *op.cit*, hlm 4

kesesuaian cara berpikir dan bekerja, kejujuran dalam pengelolaan pembiayaan, kesesuaian dengan hasil-hasil yang pernah dicapai dengan kebutuhan masyarakat, kepercayaan pada pengelolaan kegiatan dan informasi yang cukup dari pengelola.

3). Penegakan Hukum

Keseriusan dan keberhasilan untuk meluruskan yang bengkok dan dukungan pada yang benar, jujur, melalui aturan dan penegakannya sangat diharapkan masyarakat, karena kerelaan yang akan diberikan masyarakat harus diimbangi dengan keseriusan dan kejujuran untuk menegakkan aturan yang ada.

4). Efisiensi dan Efektivitas

Para pengelola biaya pendidikan perlu berhati-hati dan mematuhi aturan penggunaan anggaran sehingga tidak terjadi pemborosan dan pemanfaatan anggaran dapat efisien dan efektif.

5). Pengawasan

Konsep pengawasan dibangun agar apa yang direncanakan dapat tercapai baik jumlah maupun mutu, tanpa ada penyimpangan. Pengawasan bukan untuk menghukum dan mencari-cari kesalahan, namun

pengawasan ini menekankan pada proses pencapaian sasaran.

Dana yang berasal dari keluarga dan masyarakat itu sebenarnya lebih berperan dalam membiayai pendidikan. Hal ini terbukti ketika terjadi krisis ekonomi dimana subsidi pemerintah berkurang atau terhambat penyalurannya, pendidikan nasional masih bisa bertahan dan anak-anak dapat tetap pergi dan belajar di sekolah, hal ini berkat peranan dana keluarga.

4. Menghitung Biaya Pendidikan

Menurut Nanang Fattah, dalam satuan pendidikan, disaat menghitung/ mengukur biaya pendidikan disebut dengan pendekatan mikro. Pendekatan ini menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (*total cost*) dan jumlah biaya satuan (*unit cost*) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan-gabungan biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah³².

Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah. Dengan demikian, satuan biaya ini dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah setiap tahun dengan jumlah murid sekolah pada tahun

³² Nanang Fattah, "Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan", PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 25

yang bersangkutan. Perhitungan satuan biaya pendidikan dapat menggunakan formula sebagai berikut:

$$S_b(s,t) = f [K(s,t) : M(s,t)]$$

Keterangan:

S_b : satuan biaya murid per tahun

K : jumlah seluruh pengeluaran.

M : jumlah murid

s : sekolah tertentu, t : tahun tertentu

Selain itu biaya pendidikan menurut Nanang Fattah tidak hanya berorientasi pada uang saja, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan (*oppurtunity cost*) yang sering juga disebut *income forgone* (potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran, atau menyelesaikan studi). Yang dapat dihitung dengan formula berikut:

$$C = L + K$$

Keterangan:

C : biaya pendidikan

L : biaya langsung dan biaya tak langsung

K : jumlah rata-rata penghasilan tamatan

B. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERDASARKAN STRATEGI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Keuangan dan pembiayaan pendidikan sangat menentukan ketercapaian tujuan pendidikan sekolah, yang memerlukan sejumlah investasi dan anggaran pemerintah dan dana masyarakat. Investasi tersebut harus dikelola secara efisien dan efektif dan diarahkan langsung terhadap pencapaian tujuan. Hal ini merupakan kegiatan manajemen keuangan yang mengatur penerimaan, pengalokasian, dan pertanggungjawaban keuangan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran. Dalam kaitannya dengan perencanaan dan pembiayaan di sekolah yang telah melaksanakan MBS perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan.
2. Melakukan perbaikan terhadap peraturan dan input lain yang relevan, dengan merancang pengembangan sistem secara efektif.

3. Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap proses dan hasil MBS secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya.

Di dalam pembiayaan pendidikan di tingkat sekolah, manajemen keuangan memiliki peranan yang sangat penting. Manajemen keuangan meliputi perencanaan finansial, pelaksanaan, dan evaluasi. Jones dalam Mulyasa, mengatakan bahwa perencanaan financial merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa terjadi efek samping yang merugikan. Pelaksanaan anggaran ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Sedangkan evaluasi merupakan proses penilaian terhadap pencapaian tujuan³³.

Komponen utama manajemen keuangan meliputi prosedur anggaran, akuntansi keuangan, pembelajaran, pergudangan, pendistribusian, investasi dan pemeriksaan. Bertolak dari pengertian, tahapan, dan komponen manajemen keuangan, dalam proses manajemen keuangan sekolah diperlukan strategi pengelolaan yang efektif dan efisien. Manajemen keuangan di sekolah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan.

³³ Mulyasa, "Manajemen Berbasis Sekolah", Cet. 11, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, Hal: 171

Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, disamping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber pemerintah, masyarakat dan sumber-sumber lainnya.

1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), merupakan terjemahan dari “*school-based management*”. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat.³⁴

Berkaitan dengan manajemen, Howard M. Carlisle (dalam Suyanto) menyatakan:

“Management is the process by which the element of a group are integrated, coordinated, and efficiently achieve objective”

Manajemen adalah proses pengintegrasian, pengkoordinasian dan pemanfaatan elemen-elemen suatu kelompok untuk mencapai tujuan secara efisien. Sedangkan menurut Stoner (dalam Handoko) menjelaskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota suatu lembaga atau organisasi dan penggunaan sumber daya-

³⁴ Mulyasa, “Manajemen Berbasis Sekolah”, Cet. 11, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, Hal: 24

sumber daya lembaga atau organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Kata *Berbasis* yang mempunyai kata dasar basis, memiliki arti tumpuan; dasar; pokok; pangkalan; unsur³⁵.

Sedangkan *Sekolah*, adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah wakil kepala sekolah di setiap sekolah berbeda, tergantung dengan kebutuhannya. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain. Menurut Depdiknas, *Sekolah* adalah bentuk satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun masyarakat. Menurut statusnya, sekolah terbagi dari:

- a. *Sekolah Negeri (Public school)*, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi.
- b. *Sekolah Swasta (Private School)*, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh non-pemerintah/swasta, penyelenggara berupa badan yayasan pendidikan yang sampai saat ini badan

³⁵ Pius A. Partanto dkk, "Kamus Ilmiah Populer", Cet. 12, Arkola, Surabaya, 2002, Hal. 6

hukum penyelenggara pendidikan masih berupa rancangan peraturan pemerintah.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi (kewenangan) yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan yang partisipatif yaitu melibatkan semua warga sekolah berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan adanya otonomi (kewenangan) yang lebih besar diharapkan sekolah memiliki kewenangan secara mandiri dalam mengelola sekolah dan memilih strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan serta dapat memilih pengembangan program yang lebih sesuai dengan potensi kebutuhan daerah dimana lulusannya akan diproyeksikan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat melalui pendidikan yang bermutu yang pada akhirnya mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.³⁶ Menurut Mulyasa (2007:24) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pemikiran ke arah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan

³⁶ <http://uny.com/kuliah> online: "Inisiasi 1: Manajemen Berbasis Sekolah", Hal: 1, Akses 17 Maret 2008

berbagai kebijakan secara luas. MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (melibatkan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.

Menurut Malen, Ogawa & Kranz, 1990 dalam Abu-Duhou manajemen berbasis sekolah secara konseptual dapat digambarkan sebagai suatu perubahan formal struktur penyelenggaraan, sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasikan sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan serta bertumpu pada redistribusi kewenangan.

Manajemen sekolah yang selama ini terstruktur dari pusat telah menghambat kran komunikasi atau setidaknya terjadinya distorsi informasi antara pusat dan daerah, sehingga menimbulkan mis-implementation pada tataran riil di sekolah. Hal inilah yang menjadi bahan dilahirkannya sebuah system manajemen yang mampu menanggulangi permasalahan tersebut, yaitu suatu manajemen yang diberi kewenangan penuh kepada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri dalam batas-batas yang rasional.

Candoli, 1995 dalam Abu-Duhou, menjelaskan bahwa Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu cara untuk "memaksa" sekolah mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi menurut

justifikasi sekolah. Konsep ini menerangkan bahwa ketika sekolah diberi tanggung jawab penuh dalam mengembangkan program-program kependidikannya yang bertujuan melayani kebutuhan-kebutuhan para "stakeholder" maka pihak sekolah akan "dipaksa" untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

2. Perencanaan Pengelolaan Dana

Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Louise E. Boone dan David L. Kurtz (1984) bahwa: *planning may be defined as the proses by which manager set objective, asses the future, and develop course of action designed to accomplish these objective*. Sedangkan T. Hani Handoko (1995) mengemukakan bahwa

“ Perencanaan (*planning*) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini.”

Arti penting perencanaan terutama adalah memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin. T. Hani Handoko mengemukakan sembilan manfaat perencanaan bahwa perencanaan:

- a) membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan;

- b) membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama;
- c) memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran;
- d) membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat;
- e) memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi;
- f) memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi;
- g) membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami;
- h) meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti; dan
- i) menghemat waktu, usaha dan dana.

Indriyo Gito Sudarmo dan Agus Mulyono (1996) mengemukakan langkah-langkah pokok dalam perencanaan, yaitu :

- a. Penentuan tujuan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - 1) menggunakan kata-kata yang sederhana,
 - 2) mempunyai sifat fleksibel,
 - 3) mempunyai sifat stabilitas,
 - 4) ada dalam perimbangan sumber daya, dan
 - 5) meliputi semua tindakan yang diperlukan.
- b. Pendefinisian gabungan situasi secara baik, yang meliputi unsure sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal.

c. Merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan secara jelas dan

tegas. Hal senada dikemukakan pula oleh T. Hani Handoko

(1995) bahwa terdapat empat tahap dalam perencanaan, yaitu :

a) menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan;

b) merumuskan keadaan saat ini;

c) mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan;

d) mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah³⁷. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai satu tujuan berhubungan dengan anggaran atau budget, sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran, Lipham dalam Mulyasa mengemukakan tiga cara pandang yaitu:

a. Comparative Approach, yaitu penganggaran dilakukan dengan membandingkan besarnya penerimaan dan pengeluaran untuk setiap mata anggaran dalam setiap tahun.

³⁷ Mulyasa, "Manajemen Berbasis Sekolah", Rosdakarya. Bandung, 2007, hlm.173

- b. Planning Programming Budgeting Evaluation System (PPBES), yakni penganggaran yang berorientasi pada rencana dan sasaran program secara khusus dan umum.
- c. Functional approach, yaitu penganggaran dalam bentuk gabungan PPBES dan comparative approach.

2. Pengelolaan Dana

Sekolah merupakan sistem yang terdiri atas serangkaian komponen yang saling terkait, dan membutuhkan masukan dari lingkungan untuk melakukan proses transformasi serta mengeluarkan hasil. Kebutuhan akan masukan dan keluaran merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dan ketergantungan sekolah terhadap masyarakat dan lingkungannya. Masukan terhadap sistem sekolah mencakup perangkat lunak, keras, dan manusia yang selaras dengan perkembangan lingkungan. Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap proses transformasi dalam sistem sesuai dengan tuntutan lingkungan terhadap keluaran.

Salah satu cara berpikir, berkaitan dengan pengelolaan dana di sekolah, adalah kreatif dan dinamis selaras dengan kebutuhan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut dikenal juga dengan manajemen strategis, yang menyangkut orientasi ke masa depan, berhubungan dengan unit-unit kegiatan yang kompleks, perhatian terhadap manajemen puncak, pengaruh jangka panjang, dan alokasi sumber-sumber daya. Sehubungan dengan

pendapat tersebut, berpikir strategis, berkenaan dengan banyak pilihan sebagai alternative pemecahan masalah, memerlukan seperangkat kemampuan analisis yang tepat dan cermat untuk meminimalisir tingkat kesalahan yang timbul di masa depan³⁸. Rowe dalam Mulyasa mengungkapkan tiga hal yang utama dalam pendekatan strategis dalam konteks manajemen, yaitu strategic planning sebagai dokumen formal, strategic management sebagai upaya untuk mengelola proses perubahan, dan strategic thinking sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil yang dicapai secara berkesinambungan.

Manajemen strategis berfungsi mengarahkan operasi internal organisasi berupa alokasi sumber daya manusia, sarana fisik dan keuangan, untuk mewujudkan interaksi optimal dengan lingkungan sekitarnya. Dalam MBS, strategi tersebut dapat direalisasikan melalui penyelenggaraan sebagai berikut³⁹:

- a. Melakukan analisis internal dan eksternal terhadap berbagai potensi sumber dana.
- b. Mengidentifikasi, mengelompokkan dan memperkirakan sumber-sumber dana yang dapat digali dan dikembangkan.
- c. Menetapkan sumber-sumber dana melalui:
 - 1) Musyawarah dengan orang tua siswa baru pada awal tahun.

³⁸ *Ibid*, hlm 172

³⁹ *Ibid*, hlm. 173

2) Musyawarah dengan para guru untuk mengembangkan koperasi sekolah

3) Menggalang partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah.

4) Menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kesenian peserta didik untuk mengumpulkan dana dengan memanfaatkan fasilitas sekolah.

d. Meningkatkan peran serta masyarakat dunia usaha atau industri dalam penyelenggaraan pendidikan, antara lain dengan mengembangkan mekanisme kerjasama saling menguntungkan bagi peserta didik, lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha⁴⁰.

3. Proses Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran (*budget*) disebut juga dengan istilah penganggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.

Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif yang untuk merealisasikan rencana anggaran yang telah disusun. Kegiatan

⁴⁰ Nanang Fattah, "Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan", Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 83

ini melibatkan pimpinan tiap unit-unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan/kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana.

Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini, Lipham dalam Mulyasa mengemukakan empat fase kegiatan pokok sebagai berikut⁴¹:

- a. Merencanakan anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost-effectiveness, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.
- b. Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia.

⁴¹ Mulyasa, *op.cit*, hlm175

- c. Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembukaan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- d. Menilai pelaksanaan anggaran, yaitu menilai pelaksanaan program proses belajar-mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.

Program penyusunan anggaran memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rencana anggaran. Banyak faktor yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran pendidikan di sekolah, seperti perkembangan peserta didik, inflasi, pengembangan program, dan perbaikan serta peningkatan pendekatan belajar-mengajar⁴².

1) Fungsi Anggaran

Anggaran, disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga untuk menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Oleh karena itu, anggaran juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur

⁴² Nanang Fattah, "Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan", Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 51

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, anggaran dapat pula dijadikan alat untuk mempengaruhi dan memotivasi pimpinan atau manajer dan karyawan untuk bertindak efisien dalam mencapai sasaran lembaga. Apabila melihat perkembangannya, anggaran mempunyai fungsi yang dapat digolongkan ke dalam tiga jenis yaitu:

- a) Sebagai alat penaksir.
- b) Sebagai alat otorisasi pengeluaran dana, dan
- c) Sebagai alat efisiensi.

Anggaran sebagai alat efisiensi merupakan fungsi yang paling esensial dalam pengendalian. Dari segi pengendalian jumlah anggaran yang didasarkan atas angka-angka yang standar di bandingkan dengan realisasi biaya yang melebihi atau kurang, dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau penghematan.

2) Prinsip-prinsip dan prosedur penyusunan anggaran.

Apabila anggaran menghendaki fungsi sebagai alat dalam perencanaan maupun pengendalian, maka anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut⁴³.

- a) Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi.

⁴³ Mulyasa, *opcit*, hal. 176

- b) Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran.
- c) Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi.
- d) Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah.

Persoalan yang penting dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas. Oleh karena itu dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis. Tahapan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

- a) Menidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran.
- b) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang.
- c) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial.
- d) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh lembaga sekolah tersebut.

- e) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
- f) Melakukan revisi usulan anggaran.
- g) Persetujuan revisi anggaran.
- h) Pengesahan anggaran.

3) Bentuk-bentuk desain anggaran.

Anggaran mempunyai fungsi manajemen, baik dalam perencanaan maupun pengawasan. Untuk itu, ketetapan desain anggaran menjadi sangat menentukan. Alasannya, tidak semua anggaran dirancang untuk melakukan fungsi manajemen. Berikut ini beberapa contoh desain anggaran⁴⁴:

a) Anggaran butir per butir (*Line item budget*).

Anggaran butir per butir merupakan bentuk anggaran yang paling sederhana dan banyak digunakan. Dalam bentuk ini, setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori, misalnya gaji, upah, honor menjadi satu kategori atau satu nomor atau butir dan perlengkapan, sarana, material dengan butir tersendiri.

b) Anggaran program (*Program budgeting system*).

Bentuk ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Pada anggaran biaya per butir dihitung

⁴⁴ Nanang Fattah, opcit hlm. 53

berdasarkan jenis butir (item) yang akan dibeli, sedangkan pada anggaran program biaya dihitung berdasarkan jenis program. Misalnya, jika dalam anggaran butir per butir disebut gaji guru, sedangkan dalam laporan anggaran disebut sebagai gaji untuk perencanaan pengajaran jurusan teknik mesin hanyalah satu komponen, dan komponen lain yang termasuk program percobaan mencakup bahan-bahan dan alat-alat praktikum dan sebagainya, menjadi satu paket.

c) Anggaran berdasarkan hasil (*Performance budget*).

Sesuai dengan namanya, bentuk anggaran ini menekankan hasil (*performance*) dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Pekerjaan akhir dalam suatu program dipecah dalam bentuk beban kerja dan unit hasil yang dapat diukur. Hasil pengukurannya dipergunakan untuk menghitung masukan dalam dana dan tenaga yang dipergunakan untuk mencapai suatu program.

d) Sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran (*Planning programming budgeting system/PPBS*).

PPBS merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan

menganalisisnya secara sistematis. Dalam PPBS, tiap-tiap tujuan suatu program dinyatakan dengan jelas, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam proses ini data tentang biaya, keuntungan kelayakan suatu program disajikan secara lengkap sehingga pengambil keputusan dapat menentukan pilihan program yang paling menguntungkan.

4. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

RAPBS adalah rencana anggaran terpadu penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaan selama satu tahun pelajaran berjalan. Dana tersebut bersumber dari pemerintah, masyarakat, dan orangtua / wali siswa. Sumber dana perolehan dan pemakaian dana dipadukan dengan kondisi objektif kepentingan sekolah dan penyandang dana. Seperti diketahui, bahwa kemampuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan pendidikan terbatas, bila dibandingkan dengan tingkat tuntutan dan kebutuhan sekolah, maka dana dari pemerintah tersebut belum memadai⁴⁵.

Agar program pengajaran dan rencana kegiatan tetap berjalan, sekolah meminta bantuan / dukungan Komite Sekolah untuk mengupayakan kekurangan biaya yang dibutuhkan sekolah kepada orangtua / wali siswa dan masyarakat. Upaya lain untuk menutup

⁴⁵ Dikmenum, “Buku Saku MBS”, Jakarta, Cetakan Juni 2007

kekurangan biaya pengelolaan sekolah bersumber dari usaha resmi sekolah. Dana ini dikumpulkan secara temporer / insidentil, berdasarkan ketentuan dan peraturan pemerintah sebagai akibat fungsi dan peranan sekolah itu sendiri. Disamping itu dana yang disebut terakhir ini belum / tidak masuk dalam Program Kerja. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada publik, sekolah perlu didorong untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah rencana terpadu penerimaan dan penggunaan serta pengelolaan dana selama satu tahun pelajaran. Tujuan pedoman penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah adalah acuan bagi pengelola pendidikan, komite sekolah, dan orangtua/wali siswa dalam penyusunan RAPBS untuk memenuhi seluruh pembiayaan kebutuhan dan/atau kegiatan sekolah yang selanjutnya dibahas melalui mekanisme demokrasi, transparan dan akuntabel untuk ditetapkan menjadi anggaran APBS. Sasaran pedoman penyusunan RAPBS adalah tersedianya informasi penerimaan dan penggunaan keuangan sekolah yang berasal dari berbagai sumber dana sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan yang mengakibatkan penggunaan keuangan sekolah.

RAPBS ini disusun tahunan dan bersifat terbuka. Hal itu untuk mengikis korupsi dan mendidik sekolah menjadi organisasi modern.

Salah satu ciri organisasi modern adalah memiliki perencanaan anggaran. Sejumlah sekolah memiliki RAPBS, tapi belum ada yang benar-benar disiplin dan transparan. Dengan adanya RAPBS, sekolah harus mengestimasi dari mana saja akan mendapatkan uang, seperti iuran, sumbangan perorangan, badan usaha swasta, atau subsidi negara. Sekolah juga mengestimasi uang itu akan dikeluarkan untuk apa saja. Dari sini, audit menjadi ada dasarnya.

Cara penyusunan RAPBS pun harus jelas. RAPBS disusun dan diputuskan paling tidak oleh kepala sekolah dan orangtua siswa dan tidak bisa ditentukan satu-dua orang⁴⁶. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah keuangan tahunan sekolah sebagai pedoman pembiayaan penyelenggaraan sekolah yang ditetapkan melalui rapat pleno orangtua/wali siswa, komite sekolah, dan dewan guru serta disahkan pejabat yang ditetapkan. RAPBS dibahas dalam rapat pleno seluruh orangtua/wali siswa, pengurus komite sekolah, guru, tata usaha sekolah dan unsur lain yang relevan, secara musyawarah dengan prinsip demokratis, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya RAPBS ditetapkan menjadi APBS oleh Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah.

Pada dasarnya, dalam penyusunan RAPBS sangat dipengaruhi oleh misi dan faktor lingkungan pendidikan (sekolah). Lingkungan pendidikan sekolah dapat digolongkan menjadi internal dan eksternal.

⁴⁶ Nanang Fattah, opcit hlm. 54

Lingkungan internal sekolah mencakup tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kelengkapan fasilitas, dan biaya yang tersedia di setiap sekolah. Sedangkan lingkungan eksternal sekolah mencakup kondisi sosial ekonomi dan aspirasi masyarakat. Keadaan sosial ekonomi orangtua, globalisasi informasi dan teknologi dan industri yang berkembang sangat cepat sehingga sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Untuk mengefektifkan pembuatan anggaran belanja sekolah, yang sangat bertanggungjawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi kegiatan administratif.

5. Pengawasan anggaran

Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi⁴⁷. Semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Louis E. Boone dan David L. Kurtz (1984) memberikan rumusan tentang pengawasan sebagai : “... *the process by which manager determine whether actual operation are consistent with plans*”. Sementara itu, Robert J. Mocker sebagaimana disampaikan oleh T. Hani Handoko (1995) mengemukakan definisi pengawasan yang di dalamnya memuat unsur esensial proses pengawasan, bahwa : “Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan,

⁴⁷ T. Hani Handoko, “Manajemen”, BPFE Yogyakarta, Edisi 2, Cetakan Ketujuhbelas, Agustus 2001

merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.”

Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Selanjutnya dikemukakan pula oleh T. Hani Handoko bahwa proses pengawasan memiliki lima tahapan, yaitu : (a) penetapan standar pelaksanaan; (b) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; (c) pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata; (d) perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan; dan (e) pengambilan tindakan koreksi, bila perlu.

Pengawasan anggaran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai lokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Pihak-pihak yang

terkait dalam pengawasan anggaran adalah Kepala sekolah, para guru dan karyawan dan komite sekolah. Komite Sekolah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Sesuai SK, Komite Sekolah tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Komite ini merupakan sebuah badan mandiri yang berfungsi mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan atau sekolah. Selain itu, sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 56 dan Pasal 66 telah secara eksplisit menyebutkan keberadaan Komite Sekolah. Komite sekolah terdiri dari orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil alumni, dan wakil dari siswa. Anggota Komite dapat melibatkan dewan guru dan yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan maksimal berjumlah tiga orang. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah biasanya ditetapkan dalam AD/ART.

Tujuan pembentukan Komite untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah. Selain itu, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan

serta menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Komite memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Komite juga berfungsi menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat. Fungsi lainnya adalah mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Komite sekolah memiliki 4 (empat) peran yang sangat penting yaitu sebagai pemberi masukan / Badan Pertimbangan (Advisory Agency), pendorong (motivator) atau Badan Pendukung (Supporting Agency), Badan Pengawas / Pengontrol (Controlling Agency) dan Badan Penghubung (Mediator Agency). Peran Komite sebagai advisor, yaitu dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Peran motivator, dapat berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran Komite sebagai pengontrol dalam rangka transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan., termasuk dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut penjelasan dari Kementerian pendidikan nasional, pemberian dana dari pusat ke sekolah secara block grant mempersyaratkan adanya pengawasan dari Komite Sekolah atau Dewan Pendidikan (yang ada di tiap-tiap Kabupaten / Kota). Hal ini dimaksudkan agar penggunaan dana baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar efektif dan termonitor alokasinya, apakah sesuai dengan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan satuan pendidikan / sekolah. Sedangkan peran Komite sebagai mediator, yaitu sebagai perantara / penghubung Sekolah dengan masyarakat, atau antara sekolah dengan Dinas Pendidikan/pemerintah (eksekutif) serta memberdayakan sumber daya yang ada pada orang tua bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma Post-positivisme dengan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, Bogdan dan Taylor mendefinisikan “*Metodologi Kualitatif*” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini, diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁴⁸

Paradigma post-positivisme adalah menempatkan ilmu sosial seperti ilmu-ilmu alam, yaitu suatu metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan logika berpikir deduktif dengan pengamatan empiris, guna menemukan atau memperoleh konfirmasi tentang hukum sebab-akibat yang bisa digunakan untuk memprediksi pola-pola umum gejala sosial tertentu⁴⁹.

Deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka, yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain) atau penelitian yang di dalamnya mengutamakan

⁴⁸ Lexy Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 5

⁴⁹ Agus Salim, “Teori dan Paradigma Penelitian Sosial”, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001, hlm 18

untuk pendiskripsian secara analisis sesuatu peristiwa atau proses sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakekat proses tersebut.⁵⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas empiris sesuai fenomena secara rinci dan tuntas, serta untuk mengungkapkan gejala secara *holistik kontekstual* melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul data utama. Dalam hal ini, sebagaimana dinyatakan oleh Lexy Moeloeng (2002), kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat penelitian di sini tepat karena peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.⁵¹

Berdasarkan pada pandangan di atas, maka pada dasarnya kehadiran peneliti disini disamping sebagai instrumen juga menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan penelitian ini.

⁵⁰ Nana Sudjana, *Metode statistik*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 203

⁵¹ Lexy, *op.cit.*, hlm.121

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMK PGRI 03 Malang yang saat ini berlokasi di Jalan Raya Tlogomas IX No. 29 Malang 65144 Telp. (0341)554383 Fax.(0341)574755, yang merupakan salah satu SMK unggulan di Kota Malang. SMK PGRI 03 adalah salah satu lembaga pendidikan teknologi di kota Malang yang mengemban fungsi khusus untuk menyelenggarakan pendidikan secara profesional dalam sejumlah bidang teknologi terapan dengan mengutamakan *life skills* yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia usaha atau dunia industri saat ini.

Sebagai salah satu sekolah di Kota Malang yang memiliki prospek kedepan, SMK PGRI 03 memilih beberapa program keahlian yang *up to date*, diantaranya program keahlian Teknik Mekanik Otomotif, Bodi Otomotif, Mesin Perkakas, Teknik Las, Teknik Elektronika Industri dan Teknik Informatika Komersial. Beberapa diantara program keahlian tersebut ada yang tidak dimiliki oleh sekolah kejuruan lain yang ada di Kota Malang.

Dalam rangka mewujudkan SMK PGRI 03 Malang sebagai lembaga pendidikan yang profesional, maka dalam aktifitas sehari-hari gerak langkah komponen - komponen pendukung SMK PGRI 03 Malang dibingkai dalam sebuah tata kerja yang harmonis mulai dari pimpinan sekolah, dewan sekolah, guru-karyawan hingga siswa dengan struktur organisasi. Dalam upaya melayani siswa dengan sebaik-baiknya, guru-guru di SMK PGRI 03 Malang telah memiliki kelayakan dan profesionalisme yang cukup memadai sesuai dengan bidang mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

D. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian, menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dimana data diperoleh.⁵² Sedangkan menurut Lofland, yang dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵³

Adapun sumber data terdiri dari dua macam:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya⁵⁴. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh oleh peneliti adalah: hasil wawancara dengan Pimpinan atau Kepala Sekolah, Kepala Bagian Kurikulum, Kepala Bagian Keuangan dan Pembiayaan, Para Guru dan Karyawan SMK PGRI 03 Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan di suatu daerah, dan sebagainya.⁵⁵ Data sekunder yang diperoleh penulis adalah data yang diperoleh langsung

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT Bima Karya, 1989), hlm. 102

⁵³ Lexy, *op.cit.*, hlm. 112

⁵⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 84

⁵⁵ Ibid., hlm. 85

dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data sekolah dan berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Metode Observasi atau Pengamatan.

Mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses.⁵⁶

Pengamatan merupakan metode yang pertama-tama digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah.⁵⁷ Metode ini digunakan untuk memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data⁵⁸.

Metode observasi digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diperoleh dengan mengamati, dan mencatat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan berdasarkan strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK PGRI 03 Malang.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 189

⁵⁷ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 109).

⁵⁸ Lexy, *op.cit.*, hlm. 175

jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁹ Metode wawancara atau metode interview dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.⁶⁰

Metode wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah, Kepala Bagian Kurikulum, Kepala Bagian Keuangan dan Pembiayaan, para Guru-guru di bidang Program Keahlian yang ada di SMK PGRI 03 Malang, serta informan lain terkait dengan masalah yang dibahas.

3. Metode Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, modul kurikulum dan pembelajaran dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.⁶¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan mengambil dokumen-dokumen resmi baik yang internal maupun eksternal. Data internal merupakan data berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga yang digunakan kalangan itu sendiri. Sedangkan data eksternal berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan

⁵⁹ Lexy, *op.cit.*, hlm. 135

⁶⁰ Koentjaraningrat, *op.cit.*, hlm. 29

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 206

oleh suatu lembaga social misalnya majalah, bulletin, pernyataan, dan berita yang disampaikan kepada media massa.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang terkait dengan permasalahan.

F. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Setelah itu, dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya.⁶² Secara sistematis dan konsisten bahwa data yang diperoleh, dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis.

Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Moleong, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.⁶³

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut⁶⁴:

⁶² Koentjaraningrat, *op.cit.*, hlm. 207

⁶³ Lexy, *op.cit.*, hlm. 103

⁶⁴ Lexy, *op.cit.*, hlm 248

- 1) Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada didalam data,
- 2) Mempelajari kata-kata kunci, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- 3) Menuliskan model yang ditemukan
- 4) Koding yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini data berwujud kalimat yang dinyatakan dalam bentuk narasi bersifat diskriptif mengenai situasi kegiatan pernyataan dan perilaku yang telah dikumpulkan dalam catatan lapangan, transkrip wawancara. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan melakukan tiga cara yaitu :

- 1) Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, meringkaskan sistim pengkodean, menelusuri tema, menulis memo.
- 2) Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistimatis, sehingga menjadi sederhana selektif, serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data dimaksudkan untuk menentukan pola-pola yang bermakna, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- 3) Penarikan kesimpulan adalah langkah akhir setelah melalui proses analisis data baik selama pengumpulan data maupun sesudahnya.

Kegiatan ini dimaksudkan agar makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekuatan dan kecocokan yang merupakan validitas data.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Menurut Moleong ''kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu :

- (1) kreadibility, (2) tranferabilitas, (3) dependibilitas, (4) konfermabilitas⁶⁵.

Dalam penelitian kualitatif ini memakai 3 macam antara lain :

1) Kreadibility

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. ada beberapa tehnik untuk mencapai kreadibilitas ialah tehnik : tehnik triangulasi, sumber, pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecakupan refrensi. Pengecekan ini menggunakan triangulasi sumber data dengan cara menanyakan kebenaran data tertentu yang telah diperoleh dari pimpinan sekolah kemudian dikonfirmasi kepada informan lain seperti kepala bagian Administrasi, dan Accounting.

2) Depandibilitas

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan

⁶⁵ Moleong,, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda karya, 2002), hlm 173

sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, dan pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit dipendabilitas oleh auditor independent oleh dosen pembimbing.

3) Konfirmabilitas

kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit. Dalam pelacakan audit ini, peneliti menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti data lapangan berupa : (1) catatan lapangan dari hasil pengamatan peneliti tentang upaya manajer personalia dalam upaya peningkatan kinerja karyawan, (2) program-program yang diupayakan manajer personalia dalam upaya peningkatan kinerja karyawan. Semua program dan kegiatan karyawan dalam menjalankan tugas dalam upaya peningkatan kinerja yang mencakup metodologi serta usaha keabsahan data. Dengan demikian penelitian konfirmabilitas (kepastian) lebih menekankan pada karakteristik data dalam upaya manajer personalia dalam peningkatan kinerja karyawan. Semua keterangan data tentang perusahaan perlu dikaji kredibilitasnya. Hal ini menjadi tumpuan penglihatan, pengamatan obyektivitas untuk menuju sebagai suatu kepastian.

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa tahapan penelitian:

1. Tahap pra lapangan

- a. Memilih lapangan, dengan pertimbangan bahwa SMK PGRI 03 Malang adalah salah satu sekolah di Kota Malang yang memiliki prospek kedepan, memiliki beberapa program keahlian yang *up to date*, diantaranya program keahlian Teknik Mekanik Otomotif, Bodi Otomotif, Mesin Perkakas, Teknik Las, Teknik Elektronika Industri dan Teknik Informatika Komersial dan beberapa diantara program keahlian tersebut ada yang tidak dimiliki oleh sekolah kejuruan lain yang ada di Kota Malang.
- b. Mengurus perijinan, baik secara informal (ke pihak sekolah), maupun secara formal (ke Diknas Kota Malang).
- c. Melakukan penjajakan lapangan, dalam rangka penyesuaian dengan SMK PGRI 03 Malang selaku objek penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan

- a. Mengadakan observasi langsung ke SMK PGRI 03 Malang terhadap pembiayaan pendidikan yang berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada program keahlian Suzuki Class dan Sharp Class
- b. Memasuki lapangan, dengan mengamati berbagai fenomena proses pembelajaran dan wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan.

- c. Berperan serta sambil mengumpulkan data.
3. Penyusunan laporan penelitian, berdasarkan hasil data yang diperoleh.



BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Objek

1. Sejarah Singkat SMK PGRI 3 MALANG

SMK PGRI 3 Malang dirintis sejak tahun 1986 atas prakarsa dosen muda POLITEKNIK Universitas Brawijaya Malang yang berjumlah 16 orang (terlampir). Berdasarkan hasil pertimbangan dan kesepakatan, sekitar bulan September 1986 para perintis SMK PGRI 3 Malang bersatu untuk mendirikan STM (Sekolah Teknologi Menengah) swasta yang bernaung di bawah yayasan PGRI Kecamatan DAU kabupaten Malang, sehingga sekolah ini diberi nama STM PGRI DAU Malang.

Mendirikan sekolah ternyata memerlukan banyak biaya untuk keperluannya. Dalam hal ini, kegiatan belajar-mengajar baik pelajaran teori maupun praktek masih terjadi masalah mengenai tempat dan biayanya. Akhirnya para perintis berupaya dan bersepakat untuk meminjam SD Negeri Tlogomas 2 Malang yang berlokasi di wilayah kecamatan DAU kabupaten Malang sebagai aktivitas belajar-mengajar. Sedangkan mengenai pembiayaannya, mereka (pendiri)-lah yang harus mengeluarkan sebagian uangnya untuk menyediakan fasilitas praktek bagi siswa atau untuk kebutuhan sekolah yang diperlukan lainnya.

Pada tanggal 9 Februari 1987, turun surat keputusan (SK) Pendirian STM PGRI DAU Malang dengan nomor SK.364/32.B-1987 dari

Direktorat Pendidikan Dasar Menengah. STM PGRI DAU Malang pada saat itu berstatus tercatat.

Berdasarkan SK di atas, akhirnya pada tanggal 16 Juli 1987, STM PGRI DAU Malang mulai melaksanakan aktivitasnya dalam rangka penerimaan siswa baru yang pertama. Pada saat itu, siswa yang masuk menjadi siswa STM PGRI DAU Malang sebanyak 36 siswa yang terbagi menjadi 2 jurusan yaitu jurusan mesin dan elektronika. Walaupun jumlah siswa relatif sedikit, namun para perintis STM PGRI DAU Malang tidak putus asa untuk terus mengembangkannya.

Waktu kian berjalan, mengikuti perkembangan STM PGRI DAU Malang. Siswa STM PGRI DAU Malang lambat laun bertambah sedikit demi sedikit. Akhirnya sekitar tahun 1991 nama STM PGRI DAU Malang harus mengikuti aturan pemerintah tentang perluasan wilayah Kodya Malang. Dengan perluasan wilayah itulah, akhirnya lokasi SD Negeri Tlogomas 2 Malang kecamatan Dau yang ditempati STM PGRI DAU Malang masuk wilayah Kecamatan Lowokwaru Kodya Malang. Dengan demikian, nama STM PGRI DAU Malang berubah menjadi STM PGRI 2 Malang.

Sekitar tahun 1992, STM PGRI 2 Malang dilaksanakan akreditasi sekolah yang membawa pengaruh terhadap turunnya SK nomor 488/C/Kep/I/1992/31 Desember, dari Direktorat Pendidikan Dasar Menengah tentang perubahan status, yang awalnya berstatus tercatat berubah menjadi status diakui.

Jumlah siswa STM PGRI 2 Malang semakin lama semakin bertambah diikuti oleh bertambahnya jumlah pengajar, fasilitas sekolah atau kualitas pendidikannya. Kepercayaan masyarakat semakin meningkat dalam rangka membantu terciptanya tujuan Pendidikan Nasional.

Dengan semakin bertambahnya jumlah siswa, maka STM PGRI 2 Malang berusaha untuk meminjam SD Negeri Tlogomas 3 Malang, SD Negeri Tlogomas I Malang dan SD Negeri Dinoyo I Malang untuk di jadikan tempat belajar-mengajar bagi siswanya.

Pada tahun 1997, Pemerintah mengeluarkan aturan untuk mengubah nama Sekolah Teknologi Menengah (STM) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Karena STM PGRI 2 Malang merupakan salah satu sekolah dasar menengah yang bisa dikategorikan sekolah kejuruan. Maka dengan demikian STM PGRI 2 Malang berubah nama menjadi SMK PGRI 4 Malang. Perubahan nomor 2 ke nomor 4 tersebut karena SMK (STM atau SMEA) yang bernaung di bawah yayasan PGRI di kodya Malang itulah yang menyebabkan STM PGRI 2 Malang menduduki urutan ke-4.

Sekitar tahun 1998, ada perpindahan salah satu SMK PGRI yang ada di wilayah Kodya Malang ke wilayah Kabupaten Malang. Hal tersebut menyebabkan nama SMK PGRI 4 Malang harus berubah nama lagi menjadi SMK PGRI 3 Malang sampai sekarang.

Dengan pengelolaan dan kerjasama yang baik dari para perintis sekolah, dewan guru serta karyawan/karyawati SMK PGRI 3 Malang, akhirnya sekolah ini mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Perkembangan itu dapat dilihat dari peningkatan kuantitas siswa ataupun kualitas pendidikan siswa.

Pada tahun 1997, SMK PGRI 3 Malang menempati gedung baru di Jalan Tlogomas XI/29 Malang yang merupakan hasil swadaya maupun swadana pendiri sekolah, dewan guru serta karyawan/karyawati SMK PGRI 3 Malang. Dengan ditempatinya gedung baru itulah, akhirnya SD Negeri Tlogomas I Malang dan SD Negeri Dinoyo I Malang dikembalikan ke pihak SD tersebut. Dan sekarang tinggal SD Negeri Tlogomas 2 Malang dan SD Negeri Tlogomas 3 Malang yang berada di Jalan Tlogomas nomor 1 dan gedung baru di Jalan Tlogomas IX/29 Malang yang digunakan untuk aktivitas belajar-mengajar SMK PGRI 3 Malang.

Pembangunan gedung SMK PGRI 3 Malang, kian hari kian mengembangkan sayapnya mengikuti perkembangan jumlah perkembangan siswa yang semakin banyak dan kebutuhan belajar mengajar yang semakin meningkat. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan itulah, maka jumlah ruangan belajarpun mengalami penambahan pula. Akhirnya sejak tahun pelajaran 2001-2002, SMK PGRI 3 Malang sudah bisa sepenuhnya menempati gedung sendiri di Jalan Raya Tlogomas IX No. 29 Malang 65144 Telp.(0341)554383 Fax.(0341)574755.

SMK PGRI 3 Malang adalah sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta ketrampilan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan manusia Indonesia

Program keahlian yang ada mulai tahun ajaran 1999/2000 adalah Teknik Mesin Perkakas, Teknik Las, Mekanik Otomotif, Bodi Otomotif, Teknik Informatika dan Elektronika Industri. Sejak berdiri sampai tahun 1999 SMK PGRI 3 Malang memiliki jurusan Teknik Mekanik Umum dan Teknik Elektronika Komunikasi.

Sumber Daya Manusia dan sumber daya finansial SMK PGRI 3 Malang banyak terdukung oleh sumber dari siswa maupun swadaya dari para pengajar dan pengelola dalam pengadaan fasilitas maupun pelaksanaan pendidikan secara umum.

Pengajar yang merupakan salah satu unsur penentu kualitas anak didik di SMK PGRI 3 Malang bersumber dari lulusan S1 dan S2, dan dalam rangka kesesuaian output dengan dunia kerja setiap semester SMK PGRI 3 Malang selalu melaksanakan program kerja industri yang dilaksanakan oleh siswa dengan monitoring secara kontinyu oleh para pembimbing PRAKERIN.

Dari hasil monitoring dan laporan siswa sering dijadikan oleh pengajar dan manajemen untuk selalu mengadaptasi perubahan yang terjadi memperkirakan perkembangan yang akan terjadi di dunia kerja khususnya dan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

2. Visi dan misi SMK PGRI 3 Malang

a. Visi

Menjadi SMK yang unggul dalam prestasi dengan dilandasi Iman & Taqwa serta menghasilkan tamatan yang mampu bersaing ditingkat Nasional maupun Internasional

b. Misi

- 1) Menumbuhkan semangat keunggulan yang kompetitif diseluruh warga sekolah.
- 2) Melaksanakan proses belajar mengajar yang mengacu pada ketercapaian standar kompetensi Nasional maupun Internasional dan tetap mempertimbangkan kemampuan dasar peserta didik.
- 3) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sebagai landasan kearifan dalam bertindak.
- 4) Menerapkan pengelolaan sekolah yang mengacu pada standar Internasional dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan stakeholder.

c. Kebijakan Mutu

- 1) Mengembangkan potensi sumber daya manusia guna mengoptimalkan kinerja yang berorientasi pada hasil maksimal sesuai dengan standar Internasional.
- 2) Mencetak tenaga kerja yang kompeten dalam bidangnya dan menyalurkan ke pasar kerja.
- 3) Mengembangkan potensi peserta didik untuk mampu berwirausaha.

3. Bidang dan Program-program Keahlian SMK PGRI 3 Malang

SMK PGRI 03 adalah salah satu lembaga pendidikan teknologi di kota Malang yang mengemban fungsi khusus untuk menyelenggarakan pendidikan secara profesional dalam sejumlah bidang teknologi terapan dengan mengutamakan '*life skill*' yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja pada Dunia Usaha atau Dunia Industri saat ini. Sebagai salah satu sekolah di Kota Malang yang memiliki prospek kedepan, SMK PGRI 3 memilih beberapa program keahlian yang up to date, diantaranya program keahlian Teknik Mekanik Otomotif, Bodi Otomotif, Mesin Perkakas, Teknik Las, Teknik Elektronika Industri dan Teknik Informatika Komersial. Beberapa diantara program keahlian tersebut ada yang tidak dimiliki oleh sekolah kejuruan lain yang ada di Kota Malang.

a. Bidang Keahlian Elektronika dan TIK

Teknologi Elektronika Industri adalah program yang khusus memberikan keahlian untuk maintenance and repair, pembuatan dan perakitan alat-alat elektronika industri rumah tangga selain itu siswa/i juga mendapatkan keahlian untuk teknologi instrumentasi dan pengendalian (kontrol) seperti Programable Logic Controller dan elektronika pneumatik.

Keahlian Teknologi Informatika Komersial khusus memberikan keahlian untuk maintenance and repair soft ware dan hard ware komputer, keahlian sistem operasional komputer jaringan (LAN) dan multimedia, desain grafis, dan periklanan.

Program Keahlian :

- 1) Indonesia Power Class
- 2) Multimedia
- 3) Oracle Class
- 4) Rekayasa Perangkat Lunak
- 5) Sharp Class
- 6) Teknik Elektronika Industri
- 7) Teknik Pembangkit Tenaga Listrik

b. Bidang Keahlian Teknik Mesin

Program yang mempelajari agar bisa mengoperasikan mesin Frais, Bubut, Bor, Gerinda dan Asah Pahat sehingga mampu membuat komponen atau peralatan dengan mesin pekakas seperti pembuatan ulir luar dalam, poros tirus, roda gigi sliding dan lain sebagainya.

Program Keahlian :

- 1) Penjualan
- 2) Teknik Las
- 3) Teknik Pemesinan
- 4) Welding Class

c. Bidang Keahlian Teknik Otomotif

Bidang otomotif di sini meliputi bidang engine, sistem pemindahan tenaga, sistem penerangan, body otomotif dan kelistrikan bodi. Bidang otomotif di bagi menjadi program keahlian mekanik otomotif dan program keahlian bodi otomotif.

Program Keahlian :

- 1) Morodadi Class
- 2) Suzuki Class
- 3) Teknik Mekanik Otomotif Mobil
- 4) Teknik Mekanik Otomotif Sepeda Motor
- 5) Teknik Otomotif Body Mobil

4. Sarana dan prasarana SMK PGRI 3 Malang

- a. Bengkel Body Otomotif
- b. Bengkel Elektronika
- c. Bengkel Hardware Komputer
- d. Bengkel Instrumentasi
- e. Bengkel Las
- f. Bengkel Mobil
- g. Bengkel Sepeda Motor
- h. Laboratorium Bahasa
- i. Laboratorium Jaringan Komputer
- j. Laboratorium Komputer dan Internet
- k. Laboratorium Multimedia
- l. Laboratorium Pemancar TV dan FM
- m. Laboratorium Pengembangan Software
- n. Workshop Siswa.

5. Sumber daya manusia

a. Ketenagaan

1) Guru

Jumlah Guru sebanyak 61 orang, dengan kualifikasi 1 orang berijazah S-2, 52 orang berijazah S-1, 3 orang berijazah Diploma/Sarjana Muda dan 5 orang berijazah lainnya

2) Karyawan

Jumlah Karyawan sebanyak 25 orang, dengan kualifikasi 0 orang berijazah S-2, 7 orang berijazah S-1, 0 orang berijazah Diploma/Sarjana Muda dan 18 orang berijazah lainnya

b. Kesiswaan

Jumlah Siswa tahun pelajaran 2007-2008, sebagai berikut :

No.	Kelas	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah
1.	I	878	127	1005 siswa
2.	II	517	33	550 siswa
3.	III	472	23	495 siswa
JUMLAH		1867	183	2050 siswa

Tabel: 1

*Sumber : Data siswa SMK PGRI 3 Malang
Periode 2006-2007*

6. Struktur Organisasi SMK PGRI 03 Malang

Dalam rangka mewujudkan SMK PGRI 03 Malang sebagai lembaga pendidikan yang profesional, maka dalam aktifitas sehari-hari gerak langkah

komponen-komponen pendukung SMK PGRI 03 Malang dibingkai dalam sebuah tata kerja yang harmonis mulai dari pimpinan sekolah, dewan sekolah, guru, karyawan hingga siswa dengan struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI SMK PGRI 3 MALANG



Kepala Sekolah	: Drs. Beskinur
1. Kabid. Kesiswaan	: Drs. Murdianto, SH.
a. Staf Kesiswaan	: Hadi Bintoro, S. Pd
b. Staf Kesiswaan	: M.E Nurtaman, S. Pd, M. Si
2. Kabid. Otomotif, 2W dan 4 W	: Try Sumaryanto, S. Pd
a. Ka. Bengkel Otomotif, 2W dan 4W	: Kamsuri, S. Pd
3. Kabid. Mesin Industri dan Welding	: Santur Hidayat, S. Pd
a. Ka. Bengkel Mesin Industri dan Welding	: Priyo Pamuji, S. Pd
4. Kabid. Elektronika Industri dan RPL	: Jam'iyatul Khoir, S.T
a. Ka. Bengkel Elektronika Industri dan RPL	: Muhammad Nurullah, S.T
5. Kabid. Bursa Kerja Aktif dan Kerjasama	: Moch. Lukman Hakim, S.T
a. Staf Div. Pengembangan SDM Alumni	: Apriyanto Safari, S. Pd
b. Staf Div. Kerjasama Antar Lembaga	: Yudi Efendi, S. Pd
c. Staf Div. Pengembangan SDM	: Muhammad Sajidin, S. Pd



7. Daftar Guru SMK PGRI 3 Malang.

Guru SMK PGRI 3 Malang pada tahun pelajaran 2007-2008 sebanyak : 85 orang terdiri dari 1 guru tetap dan 84 guru tidak tetap; 58 guru pria dan 26 guru wanita. Dalam upaya melayani siswa dengan sebaik-baiknya, guru-guru dan tenaga administrasi di SMK PGRI 3 Malang telah memiliki kelayakan dan profesionalisme yang cukup memadai sesuai dengan bidang mata pelajaran dan keahlian yang menjadi tanggung jawabnya.

Tingkat profesionalisme guru-guru dan tenaga administrasi SMK PGRI 3 Malang dapat dilihat dari sisi :

1. Penguasaan Kurikulum cukup memadai
2. Penguasaan materi yang menjadi tanggung jawabnya cukup baik
3. Tertib perencanaan mengajar dan administrasi
4. Tertib evaluasi
5. Kemitraan, etos kerja, dan dedikasi yang baik.

Sementara itu untuk menunjang kegiatan pendidikan, SMK PGRI 3 Malang memiliki 30 tenaga karyawan administrasi, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap yang bertugas untuk melakukan kegiatan-kegiatan penunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, antara lain : karyawan tata usaha, tenaga laboran, pustakawan, operator komputer, dan tenaga keamanan.

Tabel: 2**DAFTAR GURU SMK PGRI 3 MALANG TAHUN 2007-2008**







B. Penyajian Data

1. Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Strategi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK PGRI 3 Malang

Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan penerapan pengelolaan pendidikan, lebih terasa lagi dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. SMK PGRI 3 Malang, sebagai salah satu sekolah yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang kemudian dibuktikan dengan meraih penghargaan ISO 9001:2000. Penghargaan tersebut merupakan salah satu syarat untuk peningkatan status sekolah menjadi standar internasional. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan, SMK PGRI 3 merupakan sekolah yang non-pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Drs. Beskinur selaku kepala sekolah bahwa:

“...SMK PGRI 3 Malang merupakan sekolah yang diselenggarakan oleh non-pemerintah atau istilah lainnya adalah sekolah swasta, penyelenggara sekolah ini adalah badan yayasan pendidikan yakni yayasan PPLP PGRI Kota Malang.”

(Wawancara dengan Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang, Bapak Drs. Beskinur di kantor admisistarsi umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2008 jam 09:30)

Sedangkan dalam hal pembiayaan, Drs Beskinur menjelaskan bahwa:

“...SMK PGRI merupakan sekolah yang swadana, yang berarti bahwa seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah ini adalah atas prakarsa dan kebijakan sekolah

dan dipertanggungjawabkan kepada pihak penyelenggara sekolah yakni YPLP PGRI Kota Malang.”

(Wawancara dengan Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang, Bapak Drs. Beskinur di kantor admisistarsi umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2008 jam 09:32)

Kedua penjelasan yang disampaikan diatas memiliki arti bahwa SMK PGRI 3 Malang merupakan sekolah yang otonomi atau mandiri. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan/kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan merdeka atau tidak tergantung. Kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan tolok ukur utama kemandirian sekolah. Pada gilirannya, kemandirian yang berlangsung secara terus menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah.

a. Sumber Pembiayaan

Sedangkan berkaitan dengan sumber pembiayaan di SMK PGRI 3 Malang, Drs. Beskinur lebih detil menjelaskan bahwa:

“...Sumber utama pembiayaan di SMK PGRI 3 Malang ini berasal dari siswa yang kemudian didukung oleh dunia industri yang kita ajak kerjasama. Sedangkan dari pemerintah, hanya berupa BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu) itu pun kita harus mengajukan proposal terlebih dahulu.”

(Wawancara dengan Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang, Bapak Drs. Beskinur di kantor admisistarsi umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2008 jam 09:40)

Dari penjelasan diatas, bisa diartikan bahwa pembiayaan pendidikan di SMK PGRI 3 malang berasal dari 3 sumber yakni, dari siswa yang merupakan sumber pemasukan utama, masyarakat yakni masyarakat industri dan pemerintah baik itu pusat, propinsi maupun daerah.

1) Biaya dari Siswa

Pembiayaan di SMK PGRI 3 Malang yang berasal dari siswa adalah berupa uang pendaftaran masuk, uang SPP, uang praktek, dan dana khusus. Besarnya uang yang berasal dari siswa tersebut ditentukan oleh kebijaksanaan sekolah. Hal ini sesuai dengan penjelasan

Ibu Katri selaku bendahara SMK PGRI 3 Malang bahwa:

“....besarnya iuran siswa atupun kenaikannya per tahun di sekolah ini ditentukan oleh pihak sekolah melalui rapat koordiansi yang diadakan pihak sekolah, yang kemudian di sampaikan kepada orang tua siswa melalui rapat orang tua/wali siswa.

(Wawancara dengan Bendahara Sekolah SMK PGRI 3 Malang, Ibu Sukatri di kantor admisistarsi umum pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008 jam 10:15)

a) Uang pendaftaran masuk

Uang pendaftaran masuk di SMK PGRI Malang berbeda-beda. Besarnya uang pendaftaran masuk disesuaikan dengan Program-program keahlian yang ada di SMK PGRI 3 Malang, hal ini dikarenakan kebutuhan tiap-tiap program keahlian selama satu tahun tidak sama. Sedangkan pembayaran uang pendaftaran masuk tersebut bisa diangsur oleh siswa sebanyak 6 kali. Untuk lebih jelasnya, dapat melihat tabel di bawah ini:

Tabel. 5
Biaya pendaftaran masuk SMK PGRI 3 Malang Tahun
2007-2008

Program Keahlian	Gelombang I	Gelombang II	Gelombang III
Manajemen Niaga	Rp. 1.398.500	Rp. 1.498.500	Rp. 1.598.500
Teknik Mesin	Rp. 1.398.500	Rp. 1.498.500	Rp. 1.598.500
Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	Rp. 1.398.500	Rp. 1.498.500	Rp. 1.598.500
Teknik Elektronika	Rp. 1.398.500	Rp. 1.498.500	Rp. 1.598.500
Informatika (Multimedia dan RPL)	Rp. 1.798.500	Rp. 1.898.500	Rp. 1.998.500
Teknik Otomotif Sepeda Motor	Rp. 1.798.500	Rp. 1.898.500	Rp. 1.998.500
Teknik Otomotif Mobil	Rp. 1.798.500	Rp. 1.898.500	Rp. 1.998.500

Sumber: Brosur Penerimaan Siswa baru SMK PGRI 3 Malang

b) Uang SPP

Uang SPP (Sumbangan Pembangunan Pendidikan) yang berasal dari siswa di SMK PGRI untuk kelas I, II, dan III pada tahun ajaran 2007-2008 sebesar Rp. 19.500 per siswa. SPP ini dibayar oleh siswa setiap satu bulan sekali dan sifatnya wajib.

c) Uang Praktek

Sedangkan uang praktek untuk kelas I, III, dan III pada tahun 2007-2008 sebesar Rp. 10.000 per siswa. Uang praktek ini dibayarkan oleh siswa setiap satu bulan sekali.

d) Dana Khusus

Dana khusus di SMK PGRI 3 Malang terdiri dari dana sumatif, dana PORSENI, dana OSIS dan dana Karyawisata.

(1) Dana Sumatif

Dana sumatif untuk kelas I, II, dan III sebesar Rp. 30.000. Untuk kelas I dan II pembayarannya dilakukan pada saat menjelang ujian tengah semester dan menjelang ujian akhir semester atau 2 kali dalam satu tahun. Sedangkan untuk kelas III, pembayarannya 1 kali dalam satu tahun yakni menjelang ujian akhir nasional (UNAS).

(2) Dana PORSENI

Dana PORSENI (Pekan Olahraga dan Kesenian) untuk kelas I, II, dan III sebesar Rp. 1.000. pembayarannya dilakukan setiap sebulan sekali selama satu tahun dan sifatnya wajib.

(3) Dana Osis

Dana OSIS untuk kelas I, II, dan III sebesar Rp. 2.000. Pembayarannya dilakukan setiap sebulan sekali selama satu tahun dan sifatnya wajib.

(4) Dana Karyawisata

Dana karyawisata untuk kelas I, II, dan III sebesar Rp. 2.500. Pembayarannya dilakukan setiap sebulan sekali selama satu tahun dan sifatnya wajib.

2) Biaya dari masyarakat industri

Untuk SMK PGRI 3 Malang, pembiayaan yang didapat dari masyarakat diperoleh dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa masyarakat perusahaan atau dunia industri, yang nantinya akan

mendukung kegiatan penyampaian teori dan praktek pendidikan yang dilaksanakan di ruang kelas atau laboratorium sekolah dan menyangkut perekrutan kerja di perusahaan yang bersangkutan, tentunya bagi siswa yang berprestasi. Untuk pembiayaan yang berasal dari dunia industri, Bu Katri menjelaskan bahwa:

“...dana yang berasal dari kerjasama dengan dunia industri bukan berupa uang, tetapi berupa alat-alat yang mendukung kegiatan belajar mengajar dan kegiatan praktek siswa”

(Wawancara dengan Bendahara Sekolah SMK PGRI 3 Malang, Ibu Sukatri di kantor admisistarsi umum pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008 jam 10:20).

Berkaitan dengan pihak-pihak dari dunia industri yang diajak bekerjasama dengan SMK PGRI 3 Malang, Secara lebih rinci, Bu Sukatri menjelaskan, bahwa:

“...di sekolah ini, ada sembilan (9) masyarakat dari dunia industri yang diajak bekerjasama yakni, PT. Oracle Teknologi Indonesia, PT. Sharp Electronics Indonesia, PT. Indonesia Power UBP Perak Grati, PT. Hero Sakti Motor Gemilang, Asosiasi Mitsubishi Region V Wilayah Indonesia Timur; UMC Jawa Timur, PT. Morodadi Prima Tbk, PT. PAL Indonesia, PT. Sumber Alfaria Trijaya, dan PT. Indomarco Prisma Tama”

(Wawancara dengan Bendahara Sekolah SMK PGRI 3 Malang, Ibu Sukatri di kantor admisistarsi umum pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008 jam 10:45).

Sebagai salah satu sekolah kejuruan PGRI terbesar di Jawa Timur, dan berstandar Internasional dengan motto "SUCCESS BY DISCIPLINE" segala unsur pendidikan yang ada berusaha menjadikan kelas-kelas yang ada di SMK PGRI 3 Malang sebagai kelas perusahaan dengan harapan lulusan bisa terserap sebanyak-banyaknya di industri, hal ini terbukti dengan kerjasama dalam bentuk :

- a) Kelas Oracle program keahlian Teknik Informatika bekerjasama dengan PT. Oracle Teknologi Indonesia.

PT. Oracle Teknologi Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, yakni memproduksi hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak) bagi komputer.

Sebagai rekan kerja SMK PGRI 3 Malang khususnya dalam menunjang proses kegiatan belajar mengajar, PT Oracle tidak memberikan sejumlah dana untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar bagi siswa SMK PGRI 3 Malang, melainkan menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang menunjang dalam penyampaian materi ataupun praktek yang dilaksanakan dalam program keahlian tersebut seperti, memberikan bahan ajar atau materi yang berkaitan dengan ketrampilan dalam merakit komputer, memperbaiki elemen-elemen yang ada dalam komputer, memberikan software (perangkat lunak) terbaru yang diproduksi oleh PT. Oracle, menyediakan tenaga pembimbing dalam penyampaian materi ataupun praktek, memberikan lahan atau tempat bagi kegiatan prakerin (praktek kerja industri) khususnya untuk kelas 3, dan memberikan kesempatan bagi lulusan pada jurusan ini untuk bergabung dengan PT. Oracle.

- b) Kelas Sharp program keahlian Teknik Elektronika Audio, Video & Home Appliance bekerjasama dengan PT. Sharp Electronics Indonesia.

PT. Sharp Electronics adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, yakni memproduksi alat-alat elektronik untuk rumah tangga seperti TV, kulkas, mesin cuci dan lain sebagainya. Sebagai rekan kerja SMK PGRI 3 Malang khususnya dalam menunjang kegiatan proses belajar mengajar, PT. Sharp Electronics tidak memberikan sejumlah dana untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar bagi siswa SMK PGRI 3 Malang, melainkan menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang menunjang dalam penyampaian materi ataupun praktek yang dilaksanakan dalam program keahlian tersebut seperti, memberikan bahan ajar atau materi yang berkaitan dengan ketrampilan dalam mempelajari dan memperbaiki elemen-elemen yang ada dalam TV dan kulkas, menyediakan tenaga pembimbing dalam penyampaian materi ataupun praktek, memberikan lahan atau tempat bagi kegiatan prakerin (praktek kerja industri) khususnya untuk kelas 3, dan memberikan kesempatan bagi lulusan pada jurusan ini untuk bergabung dengan PT. Sharp Electronics.

- c) Kelas Indonesia Power program keahlian Listrik Pembangkit bekerjasama dengan PT. Indonesia Power UBP Perak Grati.

PT. Indonesia Power UBP Perak Grati adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, yakni memproduksi alat-alat kelistrikan seperti generator, kabel listrik dan sebagainya. Sebagai rekan kerja SMK PGRI 3 Malang khususnya dalam menunjang

kegiatan proses belajar mengajar, PT Indonesia Power UBP Perak Grati tidak memberikan sejumlah dana untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar bagi siswa SMK PGRI 3 Malang, melainkan menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang menunjang dalam penyampaian materi ataupun praktek yang dilaksanakan dalam program keahlian tersebut seperti, memberikan bahan ajar atau materi yang berkaitan dengan ketrampilan dalam mempelajari dan memperbaiki elemen-elemen yang ada dalam generator listrik, menyediakan tenaga pembimbing dalam penyampaian materi ataupun praktek, memberikan lahan atau tempat bagi kegiatan prakerin (praktek kerja industri) khususnya untuk kelas 3, dan memberikan kesempatan bagi lulusan pada jurusan ini untuk bergabung dengan PT. Indonesia Power.

- d) Kelas Suzuki Roda Dua program keahlian Otomotif Sepeda Motor bekerjasama dengan PT. Hero Sakti Motor Gemilang.

PT. Hero Sakti Motor Gemilang adalah sebuah dealer yang menjual produk sepeda motor merk Suzuki. Sebagai rekan kerja SMK PGRI 3 Malang khususnya dalam menunjang kegiatan proses belajar mengajar, PT. Hero Sakti Motor Gemilang tidak memberikan sejumlah dana untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar bagi siswa SMK PGRI 3 Malang, melainkan menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang menunjang dalam penyampaian materi ataupun praktek yang dilaksanakan dalam

program keahlian tersebut seperti, memberikan sebuah sepeda motor Suzuki Smash, memberikan bahan ajar atau materi yang berkaitan dengan ketrampilan dalam mempelajari dan memperbaiki onderdil atau perangkat yang ada di dalam sepeda motor Suzuki, menyediakan tenaga pembimbing dalam penyampaian materi ataupun praktek, memberikan lahan atau tempat bagi kegiatan prakerin (praktek kerja industri) khususnya untuk kelas 3, dan memberikan kesempatan bagi lulusan pada jurusan ini untuk bergabung dengan PT. Hero Sakti Gemilang Motor.

- e) Kelas Mitsubishi program keahlian Otomotif Mobil bekerjasama dengan Asosiasi Mitsubishi Region V Wil. Indonesia Timur, UMC Jawa Timur.

Asosiasi Mitsubishi Region V Wilayah Indonesia Timur, UMC Jawa Timur adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perakitan atau pembuatan mobil Mitsubishi beserta perangkatnya. Sebagai rekan kerja SMK PGRI 3 Malang khususnya dalam menunjang kegiatan proses belajar mengajar, Asosiasi Mitsubishi Region V Wilayah Indonesia Timur, UMC Jawa Timur tidak memberikan sejumlah dana untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar bagi siswa SMK PGRI 3 Malang, melainkan menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang menunjang dalam penyampaian materi ataupun praktek yang dilaksanakan dalam program keahlian tersebut seperti, memberikan bahan ajar atau

materi yang berkaitan dengan ketrampilan dalam mempelajari dan merakit bagian-bagian yang ada dalam mobil Mitsubishi, memperbaiki onderdil atau perangkat yang ada di dalam mobil Mitsubishi, menyediakan tenaga pembimbing dalam penyampaian materi ataupun praktek, memberikan lahan atau tempat bagi kegiatan prakerin (praktek kerja industri) khususnya untuk kelas 3, dan memberikan kesempatan bagi lulusan pada jurusan ini untuk bergabung dengan perusahaan perakitan Mobil Mitsubishi.

- f) Kelas Morodadi program keahlian bodi Otomotif bekerjasama dengan PT. Morodadi Prima Tbk.

PT. Morodadi Prima Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perakitan rangka atau bodi mobil untuk truk, pickup, bus dan sebagainya. Sebagai rekan kerja SMK PGRI 3 Malang khususnya dalam menunjang kegiatan proses belajar mengajar, PT. Morodadi Prima Tbk. tidak memberikan sejumlah dana untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar bagi siswa SMK PGRI 3 Malang, melainkan menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang menunjang dalam penyampaian materi ataupun praktek yang dilaksanakan dalam program keahlian tersebut seperti, memberikan bahan ajar atau materi yang berkaitan dengan ketrampilan dalam mempelajari dan merakit bodi mobil, painting atau pengecatan bodi mobil, menyediakan tenaga pembimbing dalam penyampaian materi ataupun praktek, memberikan lahan atau tempat bagi

kegiatan prakerin (praktek kerja industri) khususnya untuk kelas 3, dan memberikan kesempatan bagi lulusan pada jurusan ini untuk bergabung dengan PT. Morodadi Prima Tbk.

- g) Kelas PAL program keahlian Teknik Mesin bekerjasama dengan PT. PAL Indonesia.
- h) Kelas Retail program keahlian Retail bekerjasama dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya dan PT. Indomarco Prisma Tama.

Berdasarkan data dari hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara SMK PGRI 3 Malang diatas dapat disimpulkan bahwa, sumber utama pembiayaan pendidikan di SMK PGRI 3 Malang diperoleh dari iuran siswa. Nominal atau jumlah iuran yang dibayarkan siswa ditentukan oleh kebijaksanaan SMK PGRI 3 Malang. Selain itu adanya kerjasama dengan dunia industri sangat membantu sekali bagi kegiatan belajar mengajar terutama dalam penyediaan bahan ajar ataupun lahan praktek bagi siswa-siswi SMK PGRI 3 Malang.

b. Pengelolaan dana

Pengelolaan dana di SMK PGRI 3 malang berpusat pada di kantor administrasi dan direalisasikan dalm bentuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis internal dan eksternal terhadap berbagai potensi sumber dana.

- 2) Mengidentifikasi, mengelompokkan dan memperkirakan sumber-sumber dana yang dapat digali dan dikembangkan.
- 3) Menetapkan sumber-sumber dana melalui:
 - a) Musyawarah dengan orang tua siswa baru pada awal tahun.
 - b) Menggalang partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah.
 - c) Menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kesenian peserta didik untuk mengumpulkan dana dengan memanfaatkan fasilitas sekolah.
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dunia usaha atau industri dalam penyelenggaraan pendidikan, antara lain dengan mengembangkan mekanisme kerjasama saling menguntungkan bagi peserta didik, lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.

c. Proses penyusunan anggaran

Proses penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana anggaran yang telah disusun. Kegiatan penyusunan anggaran di SMK PGRI 3 Malang melibatkan pimpinan tiap unit-unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan atau kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran.

Secara lebih rinci, Ibu Katri menjelaskan:

“...penyusunan anggaran di sekolah ini, dilakukan melalui rapat yang melibatkan Kepala sekolah, bendahara, ketua program-program keahlian yang ada di sekolah ini dan setelah disusun kemudian diproses oleh staf accounting yakni mbak Meta.”

(Wawancara dengan Bendahara Sekolah SMK PGRI 3 Malang, Ibu Sukatri di kantor admisistarsi umum pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008 jam 13:05).

Selanjutnya, Ibu Meta selaku staf accounting menjelaskan bahwa:

“....dalam proses accounting, sekolah ini menggunakan PSAK (Prinsip-prinsip standar akuntansi) dengan metode cashflow atau laporan arus kas”

(Wawancara dengan Staf Accounting Sekolah SMK PGRI 3 Malang, Ibu Metaria Tanjung di kantor admissistarsi umum pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008 jam 08:05).

Dalam pemrosesan anggaran, di SMK PGRI 3 Malang menggunakan prinsip-prinsip standar akuntansi dengan metode *cashflow* atau laporan arus kas yang dibuat satu minggu sekali. Mengenai penggunaan metode cahflow ini, Ibu Meta menjelaskan bahwa:

“...Tujuan penggunaan pelaporan arus kas di sekolah ini adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan”

(Wawancara dengan Staf Accounting Sekolah SMK PGRI 3 Malang, Ibu Metaria Tanjung di kantor admissistarsi umum pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008 jam 08:30).

Standar akuntansi dapat dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Sedangkan metode Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement) adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas sekolah selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Berikut ini adalah format laporan arus kas yang digunakan SMK PGRI 3 Malang:



SMK PGRI 3 MALANG

Jl. Raya Tlogomas IX/29 Malang 65144

Telp. (0341) 554383 Fax (0341) 574755

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Mei 2008

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan

- SPP
- Daftar Ulang
- Titipan Siswa / Tabungan

Jumlah Penerimaan

Pengeluaran

- B. Operasional Jurusan/Pendidikan
 - B. Gaji
 - B. Pendidikan
- B. Operasional Bursa Kerja Aktif (BKA)
 - B. Gaji dan Honor Pembimbing
 - B. Perjalanan Dinas dan Pembekalan
- B. Operasional Kesiswaan
 - B. Biaya Gaji dan Honor Pembina Ekskul
 - B. Kegiatan Siswa
- B. Operasional Kursus Mengemudi
 - B. Gaji
 - B. BBM dan Perawatan Mobil Kijang
- B. Operasional Administrasi Umum
 - B. Pegawai
 - B. Gaji
 - Beban Pegawai Lainnya
 - B. Kantor
 - B. Umum
 - B. Pengembangan

Jumlah pengeluaran operasional

Kas yang dihasilkan dari operasi

Penerimaan lain-lain

Pembayaran kas lain-lain

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Pembelian tanah, bangunan dan peralatan

Biaya ditangguhkan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan

KENAIKAN KAS BERSIH KAS DAN SETARA KAS

SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS

SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Rincian Kas dan Setara Kas

Saldo Awal

Kas

Cash on Hand

Kas Bon

Bank BNI Cab. Brawijaya

Jumlah

Saldo Akhir

Kas

Cash on Hand

Kas Bon

Bank BNI Cab. Brawijaya

Jumlah

d. Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan sekolah

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah rencana terpadu penerimaan dan penggunaan serta pengelolaan dana selama satu tahun pelajaran. Drs Beskinur menjelaskan bahwa:

“...Tujuan pedoman penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja di SMK ini pada dasarnya adalah acuan bagi penyelenggara pendidikan, komite sekolah, dan orangtua/wali siswa dalam penyusunan RAPBS untuk memenuhi seluruh pembiayaan kebutuhan dan/atau kegiatan di sini.”

(Wawancara dengan Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang, Bapak Drs. Beskinur di kantor admisistarsi umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2008 jam 09:40)

Berikut ini Rencana anggaran dan pendapatan belanja SMK PGRI 3 Malang tahun ajaran 2006-2007 dan 2007-2008

Tabel. 6
Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Sekolah

Tahun Anggaran : 2006-2007
Sekolah : SMK PGRI 3 Malang
Kotamadya : Malang

No	Uraian	Penerimaan 12 Bulan (Rp.)	Pengeluaran 12 Bulan (Rp.)
I	PENERIMAAN		
	Sisa Anggaran Tahun 2005-2006	Rp. 100.000	
MA.01	Iuran Pembangunan Pendidikan (IPP)		
MA.01.11	Uang pangkal Kelas I, 668xRp. 20.000	Rp. 13.360.000	
MA.02	Uang Sekolah/Uang Praktek		
MA.02.11 a	Uang SPP Kls. I, 688 x Rp. 19.500 x 12	Rp. 156.312.000	
MA.02.11 b	Uang SPP Kls. II, 624 x Rp. 19.500 x 12	Rp. 146.016.000	
MA.02.11 c	Uang SPP Kls. III, 431 x Rp. 19.500 x 12	Rp. 100.854.000	
MA.02.12 a	Uang Praktek Kls. I, 668 x Rp. 10.000 x 12	Rp. 80.160.000	
MA.02.12 b	Uang Praktek Kls. II, 624 x Rp. 10.000 x 12	Rp. 74.880.000	
MA.02.12 c	Uang Praktek Kls. III, 431 x Rp. 10.000 x 12	Rp. 51.720.000	
MA.05	Dana Khusus		
MA.05.11 a	Dana Sumatif Kls. I, 668 x Rp. 30.000 x 2	Rp. 40.080.000	
MA.05.11 b	Dana Sumatif Kls. II, 624 x Rp. 30.000 x 2	Rp. 37.440.000	
MA.05.11 c	Dana Sumatif Kls. III, 431 x Rp. 30.000 x 1	Rp. 12.930.000	
MA.05.12	EBTA/EBTANAS Kls. III, 431 x Rp. 450.000 x 1	Rp. 193.950.00	
MA.05.13 a	Dana PORSENI Kls. I, 668 x Rp. 1.000 x 12	Rp. 8.016.000	
MA.05.13 b	Dana PORSENI Kls. II, 624 x Rp. 1.000 x 12	Rp. 7.488.000	
MA.05.13 c	Dana PORSENI Kls. III, 431 x Rp. 1.000 x 12	Rp. 5.172.000	
MA.05.14 a	Dana OSIS Kls. I, 668 x Rp. 2.000 x 12	Rp. 16.032.000	

MA.05.14 b	Dana OSIS Kls. II, 624 x Rp. 2.000 x 12	Rp. 14.976.000	
MA.05.14 c	Dana OSIS Kls. III, 431 x Rp. 2.000 x 12	Rp. 10.334.000	
MA.05.15 a	Dana Karya Wisata Kls. I, 668 x Rp. 2.500 x 12	Rp. 20.040.000	
MA.05.15 b	Dana Karya Wisata Kls. II, 624 x Rp. 2.500 x 12	Rp. 18.720.000	
MA.05.15 c	Dana Karya Wisata Kls. III, 431 x Rp. 2.500 x 12	Rp. 12.930.000	
II	PENGELUARAN		
MA.01.1	Beban Dana IPP		
MA.01.1.12	Pembangunan Gedung/Kelas/Rehab/Sewa Gedung		Rp. 12.692.000
MA.01.1.14	Pembayaran IPP 5%/3%		Rp. 668.000
MA.02.2	Beban Uang Sekolah		
MA.02.2.11	Belanja Pegawai/HR/Guru/Karyawan		Rp. 275.880.000
MA.02.2.12.a	Belanja Barang/Inventaris/Alat Pengajaran		Rp. 40.169.500
MA.02.2.12.b	Biaya Praktek		Rp. 206.760.000
MA.02.2.13	Biaya Pemeliharaan/Sewa Gedung		Rp. 47.308.000
MA.02.2.14	Biaya Perjalanan		Rp. 8.000.000
MA.02.2.15	Biaya Penataran Guru/Karyawan		Rp. 7.500.000
MA.02.2.16	Pembayaran/Setoran Uang Sekolah 5%/3%		Rp. 30.497.100
MA.02.2.17	Biaya Rapat-Rapat		Rp. 5.000.000
MA.02.2.18	Biaya Supervisi		Rp. 3.000.000
MA.05.5	Beban Dana Khusus		
MA.05.12.a	Biaya Sumatif Kelas I		Rp. 40.080.000
MA.05.12.b	Biaya Sumatif Kelas II		Rp. 37.440.000
MA.05.12.c	Biaya Sumatif Kelas III		Rp. 12.930.000
MA.05.13	Biaya Pelaksanaan UNAS		Rp. 193.950.000
MA.05.14	Biaya Pelaksanaan PORSENI		Rp. 1.723.000
MA.05.15	Biaya Kegiatan OSIS		Rp. 41.352.000
MA.05.16	Biaya Karya Wisata		Rp. 37.396.000
MA.05.17	Realisasi Bea Siswa		-
MA.05.18	Biaya Kegiatan Sosial/Khusus		Rp. 19.174.000
	Jumlah	Rp. 1.165.620.000	Rp. 1.165.620.000
	Jumlah Sisa	Rp. -	Rp. -
	Jumlah Total	Rp. 1.165.620.000	Rp. 1.165.620.000

Sumber : RAPBS SMK PGRI 3 Malang
Periode 2006-2007

Tabel. 7
KUTIPAN BUKU KAS TABELARIS
PPLP Dasmen - PGRI KOTA MALANG

Juli 2006 - Juni 2007
SMK PGRI 3 Malang

I. Penerimaan

Bulan	Uang Iuran Wajib			Lain-lain: Sum, EBTA (Rp)	Jumlah (Rp)
	SPP (Rp)	IPP (Rp)	Praktek (Rp)		
Saldo 30/06/2006				Rp. 100.000	
Juli 2006	32.350.500	13.360.000	16.600.000	19.289.500	63.310.000
Agustus 2006	24.550.500	-	12.590.000	6.924.500	37.140.500
September 2006	44.206.500	-	22.690.000	45.098.500	66.896.500
Oktober 2006	6.123.000	-	3.140.000	1.877.000	9.263.000
November 2006	25.915.500	-	13.290.000	7.429.500	39.205.500
Desember 2006	24.823.500	-	12.730.000	8.226.500	37.553.500
Januari 2007	51.265.500	-	26.290.000	57.664.500	77.555.500
Februari 2007	15.541.500	-	7.970.000	4.513.500	23.511.500
Maret 2007	24.648.000	-	12.630.000	7.392.000	37.278.000
April 2007	51.714.000	-	26.520.000	14.586.000	78.234.000
Mei 2007	11.758.500	-	6.030.000	230.296.500	17.788.500
Juni 2007	25.623.000	-	13.120.000	29.397.000	38.743.000
Jumlah	338.520.000	13.360.000	173.600.000	432.775.000	525.480.000

II. Pengeluaran

Tabel. 8

Bulan	Uang Iuran Wajib			Lain-lain (Rp)
	SPP (Rp)	IPP (Rp)	Praktek (Rp)	
Saldo 30/06/2006				
Juli 2006	-	-		23.354.000
Agustus 2006	-	-		48.202.700
September 2006	-	-		11.280.000
Oktober 2006	-	-		8.120.250
November 2006	5.000.000	-		20.550.150
Desember 2006	-	-		7.241.500
Januari 2007	-	-		19.178.600
Februari 2007	5.000.000	-		27.709.000
Maret 2007	-	-		20.643.550
April 2007	5.000.000	668.000		35.487.300
Mei 2007	-	-		36.996.250
Juni 2007	-	-		67.575.700
Jumlah	15.000.000	668.000	-	326.339.300

Keterangan:

5% SPP, IPP, dan Praktek = Rp. 26.274.000

Sudah Setor = Rp. 15.668.000

Kurang = Rp. 10.606.000

Sumber : RAPBS SMK PGRI 3 Malang
Periode 2006-2007

Tabel. 9
Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Sekolah
Tahun Anggaran : 2007-2008
Sekolah : SMK PGRI 3 Malang
Kotamadya : Malang

No	Uraian	Penerimaan 12 Bulan (Rp.)	Pengeluaran 12 Bulan (Rp.)
I	PENERIMAAN		
	Sisa Anggaran Tahun 2005-2006	Rp. 150.000	
MA.01	Iuran Pembangunan Pendidikan (IPP)		
MA.01.11	Uang pangkal Kelas I, 926 x Rp. 20.000	Rp. 18.520.000	
MA.02	Uang Sekolah/Uang Praktek		
MA.02.11 a	Uang SPP Kls. I, 926 x Rp. 19.500 x 12	Rp. 216.684.000	
MA.02.11 b	Uang SPP Kls. II, 581 x Rp. 19.500 x 12	Rp. 135.954.000	
MA.02.11 c	Uang SPP Kls. III, 413 x Rp. 19.500 x 12	Rp. 96.642.000	
MA.02.12 a	Uang Praktek Kls. I, 926 x Rp. 10.000 x 12	Rp. 111.120.000	
MA.02.12 b	Uang Praktek Kls. II, 581 x Rp. 10.000 x 12	Rp. 69.720.000	
MA.02.12 c	Uang Praktek Kls. III, 413 x Rp. 10.000 x 12	Rp. 51.720.000	
MA.05	Dana Khusus		
MA.05.11 a	Dana Sumatif Kls. I, 926 x Rp. 40.000 x 2	Rp. 74.080.000	
MA.05.11 b	Dana Sumatif Kls. II, 581 x Rp. 40.000 x 2	Rp. 46.480.000	
MA.05.11 c	Dana Sumatif Kls. III, 413 x Rp. 40.000 x 1	Rp. 16.520.000	
MA.05.12	EBTA/EBTANAS Kls. III, 431 x Rp. 450.000 x 1	Rp. 185.850.000	
MA.05.13 a	Dana PORSENI Kls. I, 926 x Rp. 1.000 x 12	Rp. 11.112.000	
MA.05.13 b	Dana PORSENI Kls. II, 581 x Rp. 1.000 x 12	Rp. 6.972.000	
MA.05.13 c	Dana PORSENI Kls. III, 413 x Rp. 1.000 x 12	Rp. 4.956.000	
MA.05.14 a	Dana OSIS Kls. I, 926 x Rp. 2.000 x 12	Rp. 22.224.000	
MA.05.14 b	Dana OSIS Kls. II, 581 x Rp. 2.000 x 12	Rp. 13.944.000	
MA.05.14 c	Dana OSIS Kls. III, 413 x Rp. 2.000 x 12	Rp. 9.912.000	
MA.05.15 a	Dana Karya Wisata Kls. I, 926 x Rp. 2.500 x 12	Rp. 27.780.000	
MA.05.15 b	Dana Karya Wisata Kls. II, 582 x Rp. 2.500 x 12	Rp. 17.430.000	
MA.05.15 c	Dana Karya Wisata Kls. III, 413 x Rp. 2.500 x 12	Rp. 12.390.000	
II	PENGELUARAN		
MA.01.1	Beban Dana IPP		
MA.01.1.12	Pembangunan Gedung/Kelas/Rehab/Sewa Gedung		Rp. 17.594.000
MA.01.1.14	Pembayaran IPP 5%/3%		Rp. 926.000
MA.02.2	Beban Uang Sekolah		
MA.02.2.11	Belanja Pegawai/HR/Guru/Karyawan		Rp. 282.000.000
MA.02.2.12.a	Belanja Barang/Inventaris/Alat Pengajaran		Rp. 45.000.000
MA.02.2.12.b	Biaya Praktek		Rp. 232.560.000
MA.02.2.13	Biaya Pemeliharaan/Sewa Gedung		Rp. 62.406.000
MA.02.2.14	Biaya Perjalanan		Rp. 12.000.000
MA.02.2.15	Biaya Penataran Guru/Karyawan		Rp. 10.000.000
MA.02.2.16	Pembayaran/Setoran Uang Sekolah 5%/3%		Rp. 34.092.000
MA.02.2.17	Biaya Rapat-Rapat		Rp. 7.500.000
MA.02.2.18	Biaya Supervisi		Rp. 5.000.000

MA.05.5	Beban Dana Khusus		
MA.05.12.a	Biaya Sumatif Kelas I		Rp. 74.080.000
MA.05.12.b	Biaya Sumatif Kelas II		Rp. 46.480.000
MA.05.12.c	Biaya Sumatif Kelas III		Rp. 16.520.000
MA.05.13	Biaya Pelaksanaan UNAS		Rp. 185.850.000
MA.05.14	Biaya Pelaksanaan PORSENI		Rp. 1.920.000
MA.05.15	Biaya Kegiatan OSIS		Rp. 46.080.000
MA.05.16	Biaya Karya Wisata		Rp. 45.000.000
MA.05.17	Realisasi Bea Siswa		-
MA.05.18	Biaya Kegiatan Sosial/Khusus		Rp. 25.152.000
	Jumlah	Rp. 1.294.260.000	Rp. 1.294.260.000
	Jumlah Sisa	-	-
	Jumlah Total	Rp. 1.294.260.000	Rp. 1.294.260.000

*Sumber : RAPBS SMK PGRI 3 Malang
Periode 2007-2008*

e. Pengawasan Anggaran

Pengawasan anggaran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai lokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Berdasarkan penuturan Ibu Katri:

“...pengawasan pembiayaan atau keuangan di SMK ini, kalau dari sekolah sendiri adalah Pak Beskinur selaku kepala sekolah dan dari pihak luar sekolah adalah Yayasan PGRI Kotamadya Malang”
(Wawancara dengan Bendahara Sekolah SMK PGRI 3 Malang, Ibu Sukatri di kantor admissistarsi umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2008 jam 08:15)

Selain pengawasan yang dilakukan pihak sekolah dan yayasan, pembiayaan di SMK PGRI 3 Malang ini dilakukan oleh komite sekolah yang terdiri dari orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri yang bekerjasama dengan SMK PGRI 3

Malang, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil alumni, dan wakil dari siswa.

Secara lebih rinci Drs. Beskinur menjelaskan bahwa Komite Sekolah dan Orang Tua memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan SMK PGRI 3 Malang dalam hal:

- 1) Memberikan motivasi yang kuat kepada putra-putrinya yang sedang menempuh pendidikan baik ketika di keluarga, masyarakat dan memantau kemajuan belajar siswa.
- 2) Bersama sekolah menangani kesulitan belajar siswa secara terus menerus.
- 3) Berperan sebagai sarana komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan dengan membantu memberikan saran dan praktik kerja industri,
- 4) Ikut bertanggung jawab terhadap kelancaran proses pembelajaran di sekolah dan sewaktu siswa melakukan prakerin,
- 5) Berperan penuh mengambil keputusan dalam rangka menentukan kebijakan pengembangan pembelajaran yang diinginkan masyarakat luas sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian kompetensi siswa,
- 6) Memfasilitasi pembiayaan pengembangan sekolah melalui penggalangan dana dari intern maupun sponsor.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pembiayaan di SMK

PGRI 3 Malang

a. Faktor pendukung

- 1) Adanya kerjasama dengan dunia Industri yang ikut membantu dalam penyediaan sarana PBM dan praktek Program keahlian yang ada di SMK PGRI Malang
- 2) Adanya dana investasi yang dihimpun oleh kepala sekolah, para guru, dan masyarakat yang telah disetujui dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang membantu sekolah dalam menyediakan gedung dan laboratorium atau bengkel siswa yang pada akhirnya meringankan beban sekolah.
- 3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SMK PGRI 3 Malang yang berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja dan kursi.
- 4) Pengendalian anggaran yang sekolah yang sistematis. Secara khusus, pengendalian anggaran di SMK PGRI 3 Malang terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa:
 - a) dana dibelanjakan sesuai rencana,

- b) ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak,
 - c) pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan
 - d) dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan.
- 5) Adanya peran komite sekolah di SMK PGRI 3 Malang yang ikut membantu sekolah mencari dana untuk berbagai program sekolah.
 - 6) Pegelolaan dana yang profesional dengan menggunakan PSAK (Prinsip-prinsip Standar akuntansi) dan metode laba arus kas yang memungkinkan pengecekan dana atau anggaran dapat dilakukan dengan mudah dan teliti.

b. faktor penghambat

Berdasarkan hasil interview dengan kepala sekolah, bendahara sekolah, staf accounting dan observasi di SMK PGRI 3 Malang, faktor yang menghambat pembiayaan dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Menurut penjelasan Drs Beskinur, bahwa:

“...selama saya menjabat sebagai Kepala sekolah di SMK ini, hambatan yang dihadapi dalam pembiayaan berasal dari internal sekolah, misalnya pembayaran SPP siswa yang terkadang terlambat dan menunggak, laporan penulisan yang terkadang jumlah nominalnya keliru.”

(Wawancara dengan Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang, Bapak Drs. Beskinur di kantor admissistarsi umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2008 jam 09:15)

Berdasarkan penjelasan kepala sekolah diatas bahwa, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembiayaan SMK PGRI 3 Malang berasal dari faktor internal sekolah yakni berupa keterlambatan siswa dalam melakukan iuran wajib yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.



BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Strategi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK PGRI 3 Malang

Keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam penerapan MBS, yang menuntut kemampuan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Keuangan dan pembiayaan pendidikan sangat menentukan ketercapaian tujuan pendidikan sekolah, yang memerlukan sejumlah investasi dan anggaran pemerintah dan dana masyarakat. Investasi tersebut harus dikelola secara efisien dan efektif dan diarahkan langsung terhadap pencapaian tujuan. Hal ini merupakan kegiatan manajemen keuangan yang mengatur penerimaan, pengalokasian, dan pertanggungjawaban keuangan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti di SMK PGRI 3 Malang, secara keseluruhan, sumber-sumber dana pendidikan di SMK PGRI 3 Malang pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Sumber yang paling utama dalam pembiayaan pendidikan di SMK PGRI Malang berasal dari iuran wajib (SPP) yang dibayarkan siswa kepada sekolah yang telah ditetapkan SMK PGRI 3 Malang. Siswa atau calon

siswa yang mau memasuki SMK PGRI 3 Malang harus mengeluarkan biaya baik itu biaya langsung maupun tak langsung, yang besarnya tergantung pada pembebanan oleh SMK PGRI 3 Malang dan kondisi ekonomi dimana siswa itu tinggal terutama untuk biaya tidak langsung. Sebagai sekolah yang telah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), SMK PGRI 3 Malang juga menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara melembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi.. SMK PGRI 3 Malang mengadakan kerjasama dengan kelompok masyarakat, pengusaha, ataupun dunia industri untuk dapat memberikan bantuan dana pada SMK PGRI 3 Malang, hal tersebut sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam menggalang atau menghimpun dana dari kelompok masyarakat. Selain dana yang bersumber dari Siswa dan kerjasama dengan dunia industri, SMK PGRI 3 Malang mendapatkan dana dari pemerintah. Pemerintah sesuai dengan kebijakannya juga memberikan dana kepada SMK PGRI 3 Malang baik sifatnya rutin maupun insidental yang besarnya sesuai dengan ketersediaan anggaran pemerintah.

Jumlah dana yang diterima oleh SMK PGRI 3 Malang pada dasarnya merupakan salah satu komponen pembiayaan pendidikan, dan komponen ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan pembelanjaan yang akan dilaksanakan. Ukuran penerimaan adalah kecukupan, dalam arti apakah dana yang diperoleh akan cukup untuk membiayai kegiatan pendidikan, sementara itu prinsip yang diterapkan SMK PGRI 3 Malang dalam membelanjakan

adalah efektivitas dan efisiensi. Prinsip efisiensi mengandung arti bahwa pembelanjaan dilakukan dengan pengorbanan yang minimal dalam melaksanakan suatu kegiatan pendidikan, sedangkan prinsip efektivitas mengandung makna bahwa pembelanjaan yang dilakukan dapat menjadi upaya yang tepat dalam mencapai tujuan pendidikan.

Dana yang diperoleh SMK PGRI 3 Malang dari berbagai sumber tersebut digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS) SMK PGRI 3 Malang. Pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SMK PGRI 3 Malang berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. Penyusunan RAPBS SMK PGRI 3 Malang melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan komunitas sekolah. RAPBS SMK PGRI 3 Malang meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja dan kursi.

RAPBS SMK PGRI 3 Malang benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. RAPBS SMK PGRI 3 Malang ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan dipajang di tempat terbuka di sekolah. Dalam menyusun RAPBS, SMK PGRI 3 Malang secara seksama memprioritaskan

pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah. Langkah-langkah yang dipertimbangkan SMK PGRI 3 Malang dalam menyusun sebuah RAPBS adalah

1. menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah,
2. menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya,
3. menyelesaikan analisis kebutuhan,
4. memprioritaskan kebutuhan,
5. mengonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan/dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah,
6. mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan,
7. menggambarkan rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dan sebagainya), dan
8. mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi.

Dalam hal pengelolaan anggaran, pengelola anggaran sekolah di SMK PGRI 3 Malang adalah kepala sekolah, guru berpengalaman (senior) yang telah ditunjuk oleh sekolah yang dibantu tenaga administrasi, dan para anggota komite sekolah. Secara khusus, pengendalian anggaran di SMK

PGRI 3 Malang terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa:

1. dana dibelanjakan sesuai rencana,
2. ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak,
3. pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan
4. dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan.

Pengelola anggaran sekolah di SMK PGRI 3 Malang membelanjakan uang sesuai alokasi dana yang direncanakan. Setiap perubahan anggaran disetujui oleh komite sekolah bila memang harus ada perubahan dalam tahun berjalan. Dalam pengelolaan dana, SMK PGRI menggunakan PSAK (Prinsip-prinsip Standar Akuntansi) dengan model pengelolaan keuangannya menggunakan metode cash flow. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya dibuat untuk mengendalikan penerimaan dan pengeluaran, serta menyajikan laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan terkini. Pengelolaan akuntansi keuangan dengan metoda *cash flow* (aliran kas) merupakan pendekatan pengelolaan keuangan yang praktikal dan sesuai untuk lembaga pendidikan sekolah atupun unit usaha kecil yang pola pengelolaan keuangannya masih sederhana. Pengertian *cash flow* adalah aliran kas perusahaan yang secara riil diterima dan dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan operasi, pendanaan, dan investasi. Aliran kas yang masuk ke perusahaan disebut

dengan *cash in flow*, sedangkan aliran kas yang keluar dari perusahaan dinamai *cash out flow*.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pengelolaan dana pendidikan perlu dilakukan dengan baik melalui langkah-langkah sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Ini berarti bahwa melihat masalah biaya dan kualitas pendidikan aspek manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan dengan seksama, agar terhindar dari pemborosan dimana biaya yang besar ternyata tidak berdampak apapun pada kualitas pendidikan

Sedangkan dalam hal pengawasan, dilakukan pihak sekolah dan yayasan, komite sekolah yang terdiri dari orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri yang bekerjasama dengan SMK PGRI 3 Malang, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil alumni, dan wakil dari siswa. Pengawasan anggaran di SMK PGRI 3 Malang dilakukan untuk memastikan adanya:

1. pengelolaan dana yang jujur,
2. penyesuaian antara pengeluaran dengan tujuan jangka menengah sekolah, tujuan jangka pendek sekolah, dan rencana-rencana lainnya,
3. transparansi, dan
4. upaya menghindari pembelanjaan berlebih.

Kegiatan pengendalian anggaran di SMK PGRI 3 Malang meliputi rencana penerapan anggaran, catatan transaksi pemasukan dan pengeluaran (pembukuan), serta pelaporan yang transparan dan akurat (akuntabilitas).

Sedangkan dalam pembukuan di SMK PGRI 3 Malang, meliputi beberapa kegiatan yakni:

1. Setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan bukti yang sah (kuitansi).
2. Semua transaksi dicatat sesuai urutan waktu (kronologis).
3. Setiap halaman buku kas umum dilengkapi kepala surat atau kop, kolom catatan, nomor halaman, dan nama bulan.
4. Setiap sisi halaman diparaf oleh kepala sekolah dan bendahara komite sekolah.
5. Pada akhir setiap bulan, buku kas umum ditutup dengan membandingkan saldo yang tercatat pada buku kas dan saldo di rekening bank.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Strategi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK PGRI 3 Malang

Banyak sekali faktor pendukung dalam pembiayaan pendidikan di SMK PGRI 3 Malang yakni adanya kerjasama dengan dunia Industri yang ikut membantu dalam penyediaan sarana PBM dan praktek Program keahlian yang ada di SMK PGRI Malang, dana investasi yang dihimpun oleh kepala sekolah, para guru, dan masyarakat yang telah disetujui dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang membantu sekolah dalam menyediakan gedung dan laboratorium atau bengkel siswa yang pada akhirnya meringankan beban sekolah, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Sekolah (RAPBS) SMK PGRI 3 Malang yang berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS yang disusun SMK PGRI 3 Malang meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja dan kursi, Pengendalian anggaran yang sekolah yang sistematis. Secara khusus, pengendalian anggaran di SMK PGRI 3 Malang terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa: dana dibelanjakan sesuai rencana, ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak, pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan. Adanya peran komite sekolah di SMK PGRI 3 Malang yang ikut membantu sekolah mencari dana untuk berbagai program sekolah. Pengelolaan dana yang profesional dengan menggunakan PSAK (Prinsip-prinsip Standar akuntansi) dan metode laba arus kas yang memungkinkan pengecekan dana atau anggaran dapat dilakukan dengan mudah dan teliti.

Selain itu gaya kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki ciri-ciri antara lain gaya kepemimpinan yang visioner yakni kepemimpinan yang berkenaan dengan upaya membangun impian bersama untuk sekolah yang lebih baik dan lebih bermutu, kepemimpinan bergaya pembinaan yakni berkenaan dengan kegiatan bersama setiap guru untuk membahas cara agar mereka dapat memperbaiki diri. Kepemimpinan ini perlu dibangun atas dasar

kepercayaan dan bukan berdasarkan hukuman atau upaya untuk mencari kesalahan, kepemimpinan sosial berkenaan dengan upaya mengembangkan sekolah di mana kepala sekolah, guru, dan masyarakatnya saling peduli dan mendukung satu sama lain, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan yang demokratis berkenaan dengan pengembangan proses di sekolah, di mana komite sekolah, guru, murid, dan orang tua bisa memberikan masukan bagi pengambilan keputusan yang penting, kepemimpinan yang memacu kemajuan, yakni bercirikan adanya seorang pemimpin yang menetapkan jangka waktu kerja secara jelas, dan dengan mengharapkan standar kerja yang tinggi.

Sedangkan faktor yang menghambat dalam pembiayaan SMK PGRI 3 Malang berasal dari faktor internal sekolah yakni berupa keterlambatan siswa dalam melakukan iuran wajib yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan memperhatikan pada rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada hakekatnya secara keseluruhan kegiatan pembiayaan pendidikan di SMK PGRI 3 Malang dipisah dalam tiga kategori. Pertama biaya operasional yakni biaya pendidikan yang digunakan untuk menunjang kelancaran operasional pembelajaran sehari-hari. Pembiayaan dalam kelompok inilah yang saat ini coba dibantu pemerintah pusat melalui BOS (biaya operasional siswa). Kedua, biaya pengembangan staf yakni pembiayaan pendidikan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan sekolah mencapai mutu layanan yang optimal. Termasuk pembiayaan dalam kelompok ini adalah biaya untuk membantu guru-guru mengikuti berbagai seminar dan *workshop* yang terkait langsung dengan kemampuan profesional guru, membantu guru dalam meningkatkan kualifikasi akademiknya lewat beasiswa studi ke S2 dan sejenisnya. Ketiga, biaya investasi yakni pembiayaan pendidikan yang diagendakan sebagai investasi masa depan sekolah. Termasuk dalam kelompok pembiayaan ini adalah pembangunan gedung, laboratorium sekolah, jaringan internet untuk pembelajaran, penyediaan sarana prasarana perpustakaan dan sejenisnya yang semua itu bermakna sebagai investasi keunggulan sekolah

di masa depan.

2. Kegiatan pembiaayaan pendidikan di SMK PGRI 3 Malang didukung oleh beberapa faktor yakni:

- a. Adanya kerjasama dengan dunia Industri yang ikut membantu dalam penyediaan sarana PBM dan praktek Program keahlian yang ada di SMK PGRI Malang
- b. Adanya dana investasi yang dihimpun oleh kepala sekolah, para guru, dan masyarakat yang telah disetujui dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang membantu sekolah dalam menyediakan gedung dan laboratorium atau bengkel siswa yang pada akhirnya meringankan beban sekolah.
- c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SMK PGRI 3 Malang yang berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja dan kursi.
- d. Pengendalian anggaran yang sekolah yang sitematis. Secara khusus, pengendalian anggaran di SMK PGRI 3 Malang terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa:
 - 1) dana dibelanjakan sesuai rencana,

- 2) ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak,
 - 3) pembelian dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan
 - 4) dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan.
- e. Adanya peran komite sekolah di SMK PGRI 3 Malang yang ikut membantu sekolah mencari dana untuk berbagai program sekolah.
 - f. Pengelolaan dana yang profesional dengan menggunakan PSAK (Prinsip-prinsip Standar akuntansi) dan metode laba arus kas yang memungkinkan pengecekan dana atau anggaran dapat dilakukan dengan mudah dan teliti.

Sedangkan faktor hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMK PGRI 3 Malang berasal dari faktor internal sekolah yakni berupa keterlambatan siswa dalam melakukan iuran wajib yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.

B. SARAN

Untuk tenaga pendidikan:

1. Sebagai pemimpin, kepala sekolah harus meningkatkan jiwa kepemimpinan yang mengarah kepada gaya kepemimpinan yang visioner, adil, pembinaan, dan demokratis sesuai dengan semangat MBS.

2. Menghapus diskriminasi terhadap program-program keahlian yang ada di SMK PGRI 3 Malang terutama dalam pengajuan anggaran.
3. Semua pihak yang ada di sekolah harus terampil mengelola sarana dan prasarana dengan secara maksimal.
4. Menambah kerjasama dengan dunia industri terutama bagi program-program keahlian yang lain.

Untuk lembaga:

1. Memilih dan menambah tenaga pengajar yang lebih profesional dan terampil sesuai dengan bidangnya.
2. Terus mempertahankan hubungan yang dinamis dengan dunia industri yang telah diajak bekerjasama.

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH DAN
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM SMK PGRI 3 MALANG**

1. Dari manakah sumber pembiayaan pendidikan di SMK PGRI 3 Malang ?
2. Adakah dana pendidikan yang berasal dari pemerintah ?
3. Bagaimanakah pengelolaan dana pendidikan di SMK PGRI 3 Malang ?
4. Bagaimanakah prosedur penyusunan RAPBS SMK PGRI 3 Malang ?
5. Bagaimanakah prosedur pengawasan dana pendidikan di SMK PGRI 3 Malang ?
6. Siapa sajakah pihak-pihak yang melakukan pengawasan dana pendidikan di SMK PGRI 3 Malang ?
7. Adakah faktor-faktor yang mendukung pembiayaan pendidikan di SMK PGRI 3 Malang ?
8. Adakah faktor-faktor yang menghambat pembiayaan pendidikan di SMK PGRI 3 Malang ?
9. Adakah kerjasama dengan masyarakat atau dunia industri terkait dengan pembiayaan pendidikan di SMK PGRI 3 Malang ?
10. Adakah dana pendidikan yang diperoleh dari masyarakat ataupun dunia industri ?
11. Bagaimanakah alokasi dana pendidikan di SMK PGRI 3 Malang ?
12. Apakah ada dana investasi pendidikan di SMK PGRI 3 Malang ?



SMK PGRI 3 MALANG

Jl. Raya Tlogomas IX/29 Malang 65144

Telp. (0341) 554383 Fax (0341) 574755

LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Mei 2008

D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan

- SPP
- Daftar Ulang
- Titipan Siswa / Tabungan

Jumlah Penerimaan

Pengeluaran

- B. Operasional Jurusan/Pendidikan
 - B. Gaji
 - B. Pendidikan
- B. Operasional Bursa Kerja Aktif (BKA)
 - B. Gaji dan Honor Pembimbing
 - B. Perjalanan Dinas dan Pembekalan
- B. Operasional Kesiswaan
 - B. Biaya Gaji dan Honor Pembina Ekskul
 - B. Kegiatan Siswa
- B. Operasional Kursus Mengemudi
 - B. Gaji
 - B. BBM dan Perawatan Mobil Kijang
- B. Operasional Administrasi Umum
 - B. Pegawai
 - B. Gaji
 - Beban Pegawai Lainnya

- B. Kantor
- B. Umum
- B. Pengembangan

Jumlah pengeluaran operasional

Kas yang dihasilkan dari operasi

Penerimaan lain-lain

Pembayaran kas lain-lain

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi

E. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Pembelian tanah, bangunan dan peralatan

Biaya ditangguhkan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi

F. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan

KENAIKAN KAS BERSIH KAS DAN SETARA KAS

SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS

SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Rincian Kas dan Setara Kas

Saldo Awal

Kas

Cash on Hand

Kas Bon

Bank BNI Cab. Brawijaya

Jumlah

Saldo Akhir

Kas

Cash on Hand

Kas Bon

Bank BNI Cab. Brawijaya

Jumlah

DAFTAR PUSTAKA

- A. Partanto, Pius dkk. 2002. *Kamus Ilmiah Populer*. Cetakan 12. Surabaya: Arkola.
- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Peneitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Bima Karya.
- Bazzi, Sami dkk. 2006. *Kajian Cepat PKPS-BBM Bidang Pendidikan: Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Depdiknas. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)*. <http://www.depdiknas.com/mpmbs>, Akses 26 April 2008.
- Dikmenum. 2007. *Buku Saku MBS*. Jakarta. Cetakan Juni.
- Fattah, Nanang. 2006. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fatah, Syukur. *Madrasah Dan Pemberdayaan Peran Masyarakat*. http://www.wordpress.com/artikel_pendidikan, akses 25 April 2008.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Harsono. 2007. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Sofa, H. *Konsep dan Analisis Biaya Pendidikan*. http://www.wordpress.com/artikel_pendidikan. Akses 25 April 2008.
- Hallak, J. *Analisis Biaya dan Pengeluaran Untuk Pendidikan*. International Institute For Educational Planning. UNESCO. http://www.unesco.co.id/artikel_pendidikan. Akses 5 Mei 2008.
- _____ <http://www.balipost.com/balipostcetak/2007/7/25/o2.htm>, Akses 17 Maret 2008.
- _____ http://www.uny.com/kuliah_online: *Inisiasi 1: Manajemen Berbasis Sekolah*.
- _____ <http://www.depdiknas/renstra>. *Strategi Pembiayaan Pendidikan*. 2007

- _____. <http://www.wordpress.com/artikel>. *Pembiayaan Pendidikan*. Akses Tanggal 23 April 2008.
- _____. <http://uny.com/kuliah> online: *Inisiasi 2: Manajemen Berbasis Sekolah*. Akses 17 Maret 2008.
- Idochi Anwar, Moch. 2003. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyasa, 2000. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Manulang, Marihot. 2008. *Otonomi Pendidikan*.
http://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi_pendidikan.html, Akses 25 Mei 2008.
- Moeloeng, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nara, Nasrullah. *Jalan Terjal Menuju Otonomi Pendidikan*. Kompas. Selasa. 17 Desember 2008.
- Nina Toyamah dan Syaikhul Usman. 2004. *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya Terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Salim, Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sudjana, Nana. 1989. *Metode statistik*. Bandung: Tarsit
- Supriadi, Dedi. 2006. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Cetakan 6. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Suryabrata, Sumadi. 1998 *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nama : RETNO AKHYAR FAUZI

NIM : 01160043

Fak/Jur : Tarbiyah/Pendidikan IPS

Pembimbing : Dr. H. Agus Maimun M. Pd

Judul skripsi : Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Strategi Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) di SMK PGRI 3 Malang

Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
27 Maret 2007	Pengajuan Proposal	1.
26 April 2008	ACC Proposal	2.
28 April 2008	BAB I	3.
5 Mei 2008	Rumusan Masalah	4.
7 Mei 2008	Ganti Judul	5.
15 Mei 2008	ACC BAB I	6.
21 Mei 2008	BAB II dan BAB III	7.
24 Mei 2008	Revisi BAB II dan BAB III	8.
28 Mei 2008	Revisi BAB II dan BAB III	9.
31 Mei 2008	ACC BAB II dan BAB III	10.
5 Juni 2008	BAB IV	11.
16 Juni 2008	Revisi BAB IV	12.
19 Juni 2008	Revisi BAB IV, V dan VI	13.
21 Juni 2008	ACC BAB IV, V, dan VI	14.
22 Juni 2008	ACC Keseluruhan	15.

Malang, 22 Juni 2008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah

Prof. Dr. H. M. Djunaidi Ghony

150 042 031



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS TARBIYAH

Jalan Gajayana No. 50 Telepon (0341) 552398 Faksimile (0341) 552398

Nomor : Un. 3.1/TL.00/966/2008 Malang, 27 Mei 2008

Lampiran : 1 berkas

Perihal : **Penelitian**

Kepada

Yth. **Kepala SMK PGRI 03 Malang**

di-

Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mengharap dengan hormat agar mahasiswa di bawah ini:

Nama : RETNO AKHYAR FAUZI

NIM : 01160043

Semester/Tahun : Genap/2008

Judul Skripsi : ***“Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK PGRI 03 Malang”***

dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/menyusun skripsinya, yang bersangkutan mohon diberikan izin/kesempatan untuk mengadakan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Djunaidi

Ghony

NIP. 150042031

